

**HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN ARAB SAUDI DALAM  
KERJA SAMA HAJI DAN UMRAH UNTUK MEWUJUDKAN VISI ARAB  
2030 DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**



**SKRIPSI**

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh

**FAUSIAH KASIM**

**45 11 023 013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN ARAB SAUDI DALAM  
KERJA SAMA HAJI DAN UMRAH UNTUK MEWUJUDKAN VISI  
ARAB 2030 DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

FAUSLAH KASIM

4511023013

Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh :

**BOSOWA**

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulhair Burhan, S.Ip., M.A.

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.

Mengetahui :

Dekan FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi Hubungan Internasional

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.

Zulhair Burhan, S.Ip., M.A.

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Jumat, Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Skripsi dengan judul **“HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN ARAB SAUDI DALAM KERJA SAMA HAJI DAN UMRAH UNTUK MEWUJUDKAN VISI ARAB 2030 DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO”**

**Nama** : Fausiah Kasim  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 45 11 023 013  
**Jurusan** : Ilmu Politik  
**Program Studi** : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.



**Pengawas Umum :**

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.  
Dekan FISIP Universitas Bosowa

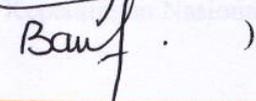
**Panitia Ujian :**

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.  
Ketua

Fivi Elvira Basri, S.Ip., M.A.  
Sekertaris

**Tim Penguji :**

1. Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.
2. Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.
3. Finahliyah Hasan, S.Ip., M.A.
4. Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A.

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## ABSTRAK

Fausiah Kasim, 45 11 023 013. “Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Kerja Sama Haji Dan Umrah Untuk Mewujudkan Visi Arab 2030 Di Era Presiden Joko Widodo”. Dibimbing oleh: Pembimbing I Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A. dan Pembimbing II Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab Saudi 2030 di era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 di Indonesia dan Arab Saudi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif kuantitatif, untuk menggambarkan bagaimana implementasi dari kerja sama Haji dan Umrah. Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah telaah pustaka (*library research*) dengan penelusuran berbagai literatur seperti buku teks, surat kabar online di internet, jurnal ilmiah, artikel, dan ke website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan website Pemerintah Arab Saudi. Teknik analisa data menggunakan teknik analisa kuantitatif yang diperoleh dari sumber *library research*, dan sumber-sumber internet.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Arab Saudi benar telah melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor jasa Haji dan Umrah. Keputusan Arab Saudi mengembangkan sektor jasa Haji dan Umrah dinilai tepat sesuai Visi Arab 2030 yakni transformasi untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi, mengingat Indonesia merupakan mitra yang baik dalam kedekatan religi yakni Islam dan memiliki muslim terbanyak di dunia.

Kata Kunci: Hubungan Bilateral, Visi Arab Saudi 2030, Kepentingan Nasional

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT dan Muhammad SAW, atas segala nikmat, inayah, taufiq, rahmat, karunia, serta kesehatan dan kekuatan yang dilimpahkan kepada penulis. Sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang menjadi syarat atas gelar sarjana yang ingin diraih pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak tantangan yang harus dihadapi penulis. Mulai dari pemilihan judul, seminar proposal hingga penyelesaian dari penulisan skripsi ini. Namun berkat kekuatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat dan terkasih, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang-orang terdekat dan terkasih dari penulis, juga segala bantuan yang didapat oleh penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya, Andi Muhammad Kasim Syamsu dan Rasni Deynir, atas segala perhatian yang diberikan kepada penulis. Segala doa dan bimbingan yang tiada henti dilimpahkan kepada saya. Segala motivasi dan kasih sayang tulus yang

telah diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT selalu mengasihi dan menyayangi kedua orangtuaku di dunia dan di akhirat.

- 2) Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada saudara kandung saya tersayang, Ahmad Faisal Kasim dan Siti Namirah Kasim yang selalu menyemangati penulis dan memberikan dukungan baik moril maupun materil.
- 3) Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh keponakanku tersayang yang membuat saya ceria setiap hari dengan kelucuan kalian dan seluruh sepupuku yang selalu juga mendukung saya.
- 4) Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku rektor Universitas Bosowa Makassar.
- 5) Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dosen dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional atas bimbingannya kepada saya dan kami secara keseluruhan mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional.
- 6) Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang memberikan kemudahan kepada kami seluruh mahasiswa mahasiswi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengurus segala sesuatu di jurusan.
- 7) Terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A. selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmunya kepada

saya dan terus meluangkan banyak waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan yang sangat membantu bagi saya dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

- 8) Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan civitas akademika Universitas Bosowa Makassar, khususnya seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang mengajar saya selama kuliah di Universitas Bosowa Makassar, Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A, Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A, Bapak Aswin, S.Ip., M.A, Ibu Rosnani, S.Ip., M.A, Ibu Finahliyah Hasan, S.Ip., M.A.
- 9) Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman dan sahabatku letting 2011 tersayang di kampus . Terima kasih untuk segala kebahagiaan dan kebersamaan yang selalu kita lewati semasa kuliah. Terima kasih juga untuk seluruh senior dan junior yang melengkapi kebahagiaan dan kebersamaan kita di kampus.
- 10) Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) saya selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan XII tahun 2016 di Pinrang Bapak Andi Hamzah Fansury, S.Pd., M.Pd.
- 11) Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan XII tahun 2016 selama di Pinrang.
- 12) Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rahma, Pak Budi dan Bu Mega yang sangat membantu saya dalam mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan administrasi di Fakultas.

- 13) Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh civitas akademik universitas Bosowa Makassar atas kemudahan dan kerjasamanya kepada penulis dalam lingkup kampus.
- 14) Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh keluarga besar penulis yang sangat membantu dan selalu mendukung untuk kelancaran dan kemudahan penulis selama masa kuliah.
- 15) Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan baik moril maupun materil dan dukungan motivasi serta doanya. Semoga Allah SWT selalu membalas segala kebaikan kalian. Aamiin Yaa Robbal Alamiin.

**BOSOWA**

**Makassar**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
1. Batasan Masalah.....	6
2. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisa Data.....	17
5. Metode Penulisan .....	17
F. Rancangan Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Hubungan Bilateral .....	20
A.1. Didi Krisna .....	20
A.2. Penerapan Konsep Hubungan Bilateral.....	21
A.3. Penerapan Konsep Hubungan Bilateral Di Arab Saudi .....	27
A.4. Penerapan Konsep Hubungan Bilateral Di Indonesia .....	29
A.5. Tujuan Konsep Hubungan Bilateral.....	30
A.6. Landasan Teori .....	30

B. Konsep Kebijakan Luar Negeri.....	32
B.1. James N. Rosenau.....	35
B.2. K. J. Holsti.....	36
C. Konsep Politik Luar Negeri (Konsep Kepentingan Nasional).....	36
C.1. Walter Carlsnaes.....	40
C.2. K.J. Holsti.....	40
C.3. Mark R. Amstutz.....	40
C.4. Penerapan Konsep Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Presiden Soekarno.....	42
C.5. Penerapan Konsep Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Presiden Soeharto.....	43
C.6. Tujuan Dan Sarana Dalam Politik Luar Negeri.....	44
C.7. Indikator Politik Luar Negeri Menurut William D. Coplin.....	44

### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

A. Profil Negara Republik Indonesia.....	47
B. Profil Negara Arab Saudi.....	49
C. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.....	52
D. Peran Pemerintah Arab Saudi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.....	56
E. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Haji Dan Umrah.....	57
F. Visi Arab 2030.....	59
G. Gambaran Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Untuk Mewujudkan Visi Arab 2030 Di Era Presiden Joko Widodo.....	61

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

A. Implementasi Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Kerja Sama Haji Dan Umrah Untuk Mewujudkan Visi Arab 2030 Di Arab Saudi Periode 2014-2019.....	63
--	----

A.1. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Terhadap Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.....	63
A.2. Asumsi Dasar Kerja Sama Bilateral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Menguntungkan Bagi Arab Saudi.....	69
B. Implementasi Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Kerja Sama Haji Dan Umrah Untuk Mewujudkan Visi Arab 2030 Di Indonesia Periode 2014-2019 .....	72
B.1. Penerapan Kebijakan Visi Arab 2030 Oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Pemerintah Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.....	72
B.2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah .....	73
B.3. Efektifitas Kebijakan Visi Arab 2030 Oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Pemerintah Indonesia.....	75
C. Manfaat Kerja Sama Haji Dan Umrah Bagi Indonesia Dan Arab Saudi.....	80
C.1. Prospek Kerja Sama Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Penyelenggaran Ibadah Haji Dan Umrah .....	82
C.2. Indikator Keberhasilan Kerja Sama Bilateral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Terhadap Indonesia Dan Arab Saudi .....	86
C.3. Manfaat Dan Dampak Ekonomi Kerja Sama Haji Dan Umrah Bagi Indonesia Dan Arab Saudi.....	88
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin selama 68 tahun lamanya, dalam berbagai bidang Indonesia dan Arab Saudi telah melakukan kerja sama. Indonesia memang merupakan mitra yang sangat baik bagi Arab Saudi khususnya bagi peningkatan hubungan agama dan budaya karena Indonesia termasuk memiliki muslim yang terbanyak di dunia, sementara Arab Saudi merupakan pusat peradaban muslim di dunia karena memiliki dua kota suci yakni Mekkah dan Madinah terletak di negara tersebut.

Kunjungan Raja Faisal pada tahun 1970 merupakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi ke Indonesia. Sudah 47 tahun lalu, kali ini Raja Arab Saudi yakni Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta 1500 rombongan akan berkunjung dan melakukan kerja sama dan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada awal maret 2017 yang terkait penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah dan bantuan bagi 110 korban jiwa akibat jatuhnya crane tahun 2015 di Mekkah. Kedatangan Raja Salman ke Indonesia disambut baik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Ihsanuddin, 2017).

Dengan kunjungan Raja Salman ke Indonesia, intensitas interaksi dan kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat di kedua negara akan meningkat. Yang belum pernah terjadi sebelumnya, terdapat begitu banyak pertukaran kunjungan tingkat tinggi. Terdapat begitu banyak

perjanjian kerja sama yang ditandatangani hanya dalam satu tahun yakni 11 perjanjian diberbagai sektor, termasuk agama dan ekonomi.

Salah satu tugas besar yang dihadapi kedua belah pihak adalah memastikan penerapan yang efektif dari perjanjian yang ditandatangani selama kunjungan Raja Salman, juga pada kesempatan lain. Kedua belah pihak juga harus mulai mempersiapkan pertemuan komisi bersama tingkat menteri pertama yang dijadwalkan pada tahun 2018, untuk mengevaluasi kemajuan dan mengatasi tantangan dalam hubungan bilateral.

Tonggak penting lainnya dalam pengembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi adalah kerja sama Haji dan Umrah, yang berkisar antara lain dari 10.000 kuota tambahan sejak tahun 2017 ini merupakan terbesar di dunia hingga meningkatkan akomodasi hingga inisiatif rute Mekkah yang lebih baru. Menteri luar negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers usai pertemuan menerangkan, Presiden Joko Widodo secara khusus mengapresiasi pemerintah Arab Saudi terkait pengembalian kuota Haji normal Indonesia sebesar 211 ribu jemaah. Jumlah tersebut belum termasuk penambahan kembali sebesar 10 ribu jemaah untuk tahun 2017 hingga berjumlah total 221 ribu jemaah. Arab Saudi menyepakati kuota Haji Indonesia tahun 2019 sebanyak 221 ribu atau sama dengan tahun 2018. Kesepakatan ini tertuang dalam penandatanganan *MoU* penyelenggaraan ibadah Haji antara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin di Mekkah. (Nashir, 2018).

Khususnya pada inisiatif rute Mekkah untuk pertama kalinya dalam sejarah jemaah Indonesia dapat menyelesaikan proses masuk ke Arab Saudi di Indonesia melalui bandara khusus. Dengan demikian, ini memotong beberapa prosedur yang biasanya membutuhkan waktu tertentu yang harus dilakukan saat kedatangan mereka di Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia memuji inisiatif rute Mekkah yang dilaksanakan dibawah arahan penjaga dua Masjid Suci dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman, dalam rangka Program Transformasi Nasional Saudi 2020 dan visi Saudi 2030 untuk melayani dan memfasilitasi para peziarah dengan lebih baik. Adapun visi Arab 2030 yang disampaikan oleh Pangeran Mohammad bin Salman memiliki tiga pilar utama. Pilar pertama adalah menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Kedua, determinasi sebagai kekuatan investasi global. Dan ketiga, mengubah Arab Saudi sebagai perantara bagi tiga benua yakni, Asia, Eropa dan Afrika.

Salah satu sasaran dari visi Arab 2030 tersebut adalah peningkatan kapasitas jemaah Umrah, dari hanya sekitar 8 juta menjadi 30 juta jemaah setiap tahun. Visi Arab 2030 ini juga memerlukan investasi besar-besaran dibidang infrastruktur, perumahan, pendidikan, energi, pariwisata, dan perbankan. (Nugraha, 2018).

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan merupakan ibadah yang hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah Haji adalah bentuk ritual

tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim Haji atau bulan Dzulhijjah. Sedangkan ibadah Umrah bisa dilaksanakan kapanpun karena tidak adanya aturan waktu.

Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang menjanjikan untuk calon jemaah yang berminat melaksanakan Haji dan Umrah di Tanah Suci. Pasalnya, jumlah penduduk muslim di dunia pada tahun 2017 mencapai 1,8 miliar jiwa atau mencapai 24% dari populasi global. Adapun penduduk muslim di Indonesia mencapai 87% atau 215 juta jiwa dari total penduduk Indonesia atau 13% dari penduduk dunia.

Bagi kebanyakan orang Indonesia, Haji dan Umrah berarti pergi ke Arab Saudi. Arab Saudi seperti rumah kedua bagi orang Indonesia. Namun demikian, orang Indonesia harus menunggu selama 25-30 tahun sebelum akhirnya dapat datang ke rumah kedua mereka untuk melakukan Haji. Saat ini, Arab Saudi mengalokasikan 221.000 kuota Haji untuk Indonesia yang pada tahun sebelumnya berkisar 170.000 kuota Haji. Memang, ini adalah kuota terbesar di dunia, namun dengan kerja sama yang diperkuat, terdapat banyak peluang untuk ditingkatkan. Penambahan kuota Haji ini termasuk dalam nota kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Urusan Islam Dakwah dan Bimbingan Kerajaan Arab Saudi di bidang urusan Islam..

Pemerintah Indonesia bekerja erat dengan pemerintah Arab Saudi untuk memungkinkan kuota Haji tambahan sebesar 30.000, menjadikannya total 250.000 untuk orang Indonesia. Tentu saja pengaturan rinci harus dibuat, terutama akomodasi di Mina. Untuk tujuan ini, pemerintah Indonesia siap untuk secara

aktif berkontribusi dan lebih meningkatkan kerja sama Haji yang ada dengan pemerintah Arab Saudi.

Indonesia memuji visi 2030 kerajaan Arab Saudi, yang secara komprehensif mengubah kondisi ekonomi dan sosial negara dan masyarakatnya. Visi Arab 2030 adalah rencana untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi dengan mengembangkan sektor layanan umum, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata, serta agama.

Rincian visi ini diumumkan pada tanggal 25 April 2016 oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman. Proyek yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi ini dapat menghabiskan biaya antara \$3,7 juta hingga \$20 juta.

Beberapa misi yang ingin dicapai oleh visi ini adalah:

- 1) Indeks pemerintahan elektronik naik dari 36 menjadi 50
- 2) Semakin melokalkan sektor minyak dan gas dari 40% menjadi 75%
- 3) Menambah pendapatan non minyak dari \$163 miliar menjadi \$1 triliun setiap tahunnya
- 4) Menambah proporsi ekspor non minyak dari 16% menjadi paling tidak 50% produk domestik bruto non minyak
- 5) Menambah kontribusi sektor swasta terhadap produk domestik bruto dari 40% hingga 65%
- 6) Menambah persentase investasi langsung terhadap produk domestik bruto dari 3,8% menjadi seperti rata-rata dunia 5,7%
- 7) Menambah kontribusi usaha kecil dan menengah dari 2% produk domestik bruto menjadi 35%

8) Melompat dari peringkat 25 menjadi 10 besar dalam Indeks Persaingan Global

9) Secara efektif melipat gandakan jumlah situs arkeologi yang terdaftar di UNESCO.

Transformasi bukanlah proses yang mudah dan selalu menantang, namun ini adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Dibawah bimbingan dan kepemimpinan Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammad Bin Salman, Indonesia percaya bahwa transformasi akan berjalan lancar dan berhasil. “Saya yakin Indonesia dapat menjadi mitra yang strategis dalam upaya mencapai visi 2030 Arab Saudi melalui kerja sama ekonomi yang erat sebagai sesama negara muslim” ujar Presiden Joko Widodo mengawali pertemuan bilateral kedua negara. (Himawan, Tanjung, 2017)

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Implementasi hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 di Indonesia dan Arab Saudi.

### **2. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana implementasi hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi

Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 di Indonesia dan Arab Saudi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 di Indonesia dan Arab Saudi.
- b. Untuk mengetahui dampak ekonomi dan beragam manfaat dari kerja sama Haji dan Umrah bagi Indonesia dan Arab Saudi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- Kegunaan yang bersifat praktis, yakni manfaat penelitian yang dapat diaplikasikan untuk kemanfaatan masyarakat.

Yaitu untuk masyarakat di Indonesia khususnya di kota Makassar semakin tau berbagai fasilitas pelayanan Haji dan Umrah serta rute khusus yang diberikan kepada jemaah Indonesia dan peningkatan kuota Haji yang diberikan oleh Raja Salman bagi rakyat Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kerja sama ibadah Haji dan Umrah untuk menyukseskan visi Arab 2030, atau dengan kata lain untuk mengetahui implementasi dari kerja sama bilateral tersebut di Indonesia dan Arab Saudi.

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terhadap penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah mulai dari Indonesia hingga di Arab Saudi.

- Untuk mengetahui dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan manfaat lainnya di Indonesia dan di Arab Saudi.
- Untuk memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya bagi kerja sama Internasional dan Hubungan Bilateral.
- Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

#### **D. Kerangka Berfikir/Kerangka Konseptual**

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan konsep yang tepat sebagai alat analisis yang berkaitan dengan objek penelitian dan dapat berguna membantu penulis untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai rumusan masalah yang diangkat. Penulis mengambil Konsep Hubungan Bilateral, Konsep Kebijakan Luar Negeri, dan Konsep Politik Luar Negeri yang dianggap sesuai.

- Konsep Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi serta keagamaan diantara kedua negara.

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa-bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar-bangsa yang mana terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral yakni: Suatu bentuk kerja sama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh disebelah lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi. (Kusumohamidjojo, 1987, 3) Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa: Hubungan kerja sama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. (Plano, 1990, 7)

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak atau dua negara”. (Krisna, 1993, 18)

Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerja sama dibidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan keamanan.

Namun dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah hubungan bilateral yang difokuskan pada kerja sama ekonomi, karena penulis membahas mengenai penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah antara Indonesia dan Arab Saudi guna mewujudkan visi Arab 2030. Visi Arab 2030 merupakan transformasi pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dengan melakukan pengembangan dibidang lain seperti agama, maka pembahasan ini juga menyangkut pembahasan tentang ekonomi, karena sektor jasa Haji dan Umrah juga merupakan sumber pendapatan yang sangat besar bagi Arab Saudi. Transformasi Arab Saudi dalam visi Arab 2030 juga membutuhkan pendanaan yang luar biasa besar, yaitu target pemerintah Arab Saudi di tahun 2030 untuk menampung sekitar 30 juta jemaah Umrah pertahun yang pada sebelumnya hanya sekitar 8 juta jemaah saja. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah menimbulkan hubungan saling timbal balik diantara kedua negara dikarenakan keduanya saling membutuhkan guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang variabel-variabel yang harus diperhitungkan dalam kerja sama bilateral adalah:

- 1) Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
- 2) Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
- 3) Kredibilitas ancaman serta gangguan.
- 4) Derajat kebutuhan dan ketergantungan
- 5) Responsivitas dikalangan pembuat keputusan. (Holsty, 1988, 22)

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni: konflik dan kerja sama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantung tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Setiap terbinanya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa: Melalui kerja sama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi dan politik domestik tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama. (Coplin, 1992, 263)

Selanjutnya dalam konsepsi ideal pengambilan keputusan politik luar negeri senantiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, yaitu membentuk sistem

yang lebih menawarkan pola dan tata cara hidup politik dalam arti yang seluas-luasnya, bebas dari kekurangan materil serta bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan (Sudarsono, 1988, 607). Dalam kaitannya dengan *rationality and foreign policy*, bahwa perwujudan atau penentu sasaran, objek atau mitra hubungan merupakan pilihan yang rasional dengan memperhitungkan sirkumstansi internasional dan kondisi domestik demi meminimalisasi kerugian politik serta mempertahankan posisi politik dipentas internasional. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai (Viorti, 1987, 527). Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bisa jadi mengandung makna konflik dan kerja sama.

Haji dan Umrah telah menjadi kepentingan nasional di Indonesia. Hubungan bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bentuk penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah bermakna kerja sama untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini Arab Saudi yang memiliki 2 kota suci yakni Mekkah dan Madinah adalah negara tujuan umat Islam yang akan melaksanakan ibadah Haji dan Umrah, Arab Saudi melakukan kerja sama ini dengan Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia. Indonesia sangat bergantung kepada Arab Saudi dalam melaksanakan ibadah Haji dan Umrah karena Arab Saudi merupakan negara yang memiliki 2 kota suci Mekah dan Medinah, serta memiliki Kakbah yang merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam dalam

beribadah kepada Allah SWT, sedangkan Arab Saudi bergantung kepada Indonesia untuk mewujudkan visi Arab Saudi 2030, yakni diversifikasi ekonomi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dengan melakukan pengembangan dibidang jasa Haji dan Umrah.

Penulis akan meneliti bagaimana implementasi kerja sama bilateral Haji dan Umrah, dan bagaimana manfaat yang ditimbulkan dalam kerja sama ini bagi Indonesia dan Arab Saudi .

➤ Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer, serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerja sama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.

Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri atau jabatan yang setara. Dibeberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Prancis dan Finlandia,

dimana kepala negara adalah yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, kepala negara yaitu Presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.

Menurut James N Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain.

Sedangkan menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan, dan tindakan.

Kebijakan luar negeri pemerintah Arab Saudi dalam visi Arab 2030 terhadap Indonesia telah diimplementasikan dengan penambahan kuota Haji untuk jemaah Haji asal Indonesia dan peningkatan pelayanan termasuk jalur *fast track* bagi keamanan dan kenyamanan bagi seluruh jemaah Haji dan Umrah dalam melaksanakan ibadah di Arab Saudi.

#### ➤ Konsep Politik Luar Negeri

Kebijakan atau politik luar negeri memang bukan sebuah defenisi, tetapi konsep ini sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dari setiap negara.

Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional.

Politik luar negeri menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

Politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit suatu negara, sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan.

Dengan mengaitkan kedua elemen tersebut, maka kita dapat menilai sejauh mana keefektifan pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian politik luar negeri yang dijalankan suatu negara dapat dianggap berhasil jika memiliki suatu strategi diplomasi tertentu yang secara efektif dapat melindungi pencapaian kepentingan nasional negara tersebut.

Dalam hal ini Haji dan Umrah telah termasuk dalam kepentingan nasional Indonesia, maka sangat penting Indonesia melaksanakan politik luar

negeri terhadap Arab Saudi untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Sedangkan Arab Saudi, melaksanakan politik luar negeri terhadap Indonesia dalam kebijakan visi Arab 2030 guna mencapai tujuan nasionalnya. Karena visi Arab 2030 itu adalah transformasi pemerintah Arab Saudi guna mengurangi ketergantungan pada minyak bumi atau mendiversifikasi ekonomi, maka Arab Saudi mengembangkan dibidang lain salah satunya dibidang jasa yaitu Haji dan Umrah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan fenomena yang diteliti seobjektif mungkin. Untuk menjawab apa dan bagaimana implementasi hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo di Indonesia dan Arab Saudi.

Kuantitatif, yaitu penelitian untuk mengetahui dampak ekonomi dan manfaat lainnya bagi Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama tersebut.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data Sekunder adalah data melalui penelusuran dari berbagai literatur, yakni buku teks, jurnal online, artikel, surat kabar online di internet dan penelusuran ke website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Pemerintah Arab Saudi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Telaah Pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan cara menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah periode 2014-2019, serta tentang visi Arab 2030 dan implementasinya.

Data yang diperoleh dari buku teks; jurnal ilmiah; surat kabar online; artikel; penelusuran di internet dan website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Pemerintah Arab Saudi.

### **4. Teknik Analisa Data**

Analisa Kuantitatif, yaitu analisa terhadap data-data statistik yang diperoleh dari sumber yang kompeten mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

### **5. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deduktif, yaitu penulis akan mendeskripsikan permasalahan secara umum kemudian akan menarik kesimpulan secara khusus pada akhir pembahasan sesuai dengan judul yang diangkat. Penulis akan menjelaskan kondisi negara Indonesia dan Arab Saudi, dan menjelaskan manfaat dari kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah bagi kedua negara.

## **F. Rancangan Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian dan analisa data penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi), dengan rancangan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab Pertama; yaitu Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual atau kerangka berfikir, metode penelitian, dan rancangan sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua; yaitu Tinjauan Pustaka, yang berisi penelusuran kepustakaan dan literatur tentang Konsep Hubungan Bilateral, Konsep Kebijakan Luar Negeri, dan Konsep Politik Luar Negeri.
3. Bab Ketiga; yaitu Gambaran Umum objek penelitian, berisi profil negara Republik Indonesia, profil negara Arab Saudi, peran pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, peran pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Haji dan Umrah, Visi Arab 2030, dan gambaran hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo.
4. Bab Keempat; analisis Pembahasan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 di Indonesia dan Arab

Saudi, serta manfaat bagi Indonesia dan Arab Saudi dari kerja sama Haji dan Umrah.

5. Bab Kelima; yaitu Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Hubungan Bilateral**

##### **A.1. Didi Krisna**

Dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)” Dengan kata lain, suatu negara dalam melakukan kerja sama dengan negara lain pasti memiliki tujuan-tujuan atau motif-motif tertentu yang ingin dicapai, dan pada dasarnya masalah suatu kerja sama terletak pada pencapaian sasaran, yaitu tujuan akhir yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran kerja sama yang ditentukan oleh persamaan kepentingan yang fundamental dari masing-masing pihak yang melakukan kegiatan kerja sama tersebut. (Abardin, 1999)

Dalam hal ini hubungan tersebut terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Indonesia dan Arab Saudi, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kepentingan yang fundamental. Yakni Indonesia memiliki kepentingan nasional yaitu melakukan ibadah Haji dan Umrah ke Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi memiliki kepentingan nasional yang tertuang dalam kebijakan Visi Arab 2030.

## **A.2. Penerapan Konsep Hubungan Bilateral**

Dalam hubungan internasional dikenal akan hubungan kerja sama antar negara yang merupakan pertemuan beragamnya kepentingan nasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri.

Negara-negara yang mengadakan hubungan bilateral ini memiliki kepentingan-kepentingan yang strategis dan sasaran utama dalam menyelenggarakan politik luar negerinya. Selain itu dengan melakukan hubungan bilateral, maka akan tercipta saling pengertian dan suasana yang harmonis dari kedua negara. Meskipun terdapat kendala secara geografis ataupun perbedaan pandangan, suatu negara akan tetap melakukan hubungan bilateralnya dengan negara lain dalam mewujudkan strategi globalnya.

Hakekat dari pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal (global) guna membentuk suatu wadah yang dapat dilaksanakan guna menghindari berbagai pembenturan kepentingan dan menghindari konflik yang bersifat internasional.

Dalam proses pelaksanaan hubungan bilateral Spiegel menyatakan bahwa dapat ditemukan 3 motif, yaitu (1995:67):

1. Memelihara Kepentingan Nasional
2. Memelihara Perdamaian
3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi (om, 2018)

Dalam kerangka hubungan internasional, terdapat interaksi dan hubungan antar negara, baik yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non negara. Bilamana suatu negara berada dalam kondisi yang tidak

memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan sumber daya sendiri, maka berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain yang secara sumber daya sangat lebih, sangatlah penting manfaatnya dalam hal tukar menukar barang maupun jasa, serta sumber daya dengan prinsip saling menopang satu sama lain. Hubungan yang dibangun terdiri dari berbagai bidang tergantung kebutuhan kedua negara bersangkutan. Misalnya, hubungan dibidang perpolitikan, perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan pertahanan-keamanan serta keagamaan.

Dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respon. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran, tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Apapun alasannya, negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respon, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lainnya agar menerima keinginan politiknya.

Bentuk-bentuk interaksi dapat dibedakan berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi serta pola interaksi yang terbentuk. Dalam hubungan internasional, interaksi antar aktor dapat dikenali karena intensitas keberulangnya sehingga membentuk suatu pola tertentu. Secara umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa akomodasi (*accommodate*), mengabaikan (*ignore*), berpura-pura seolah-olah informasi/pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*),

mengulur-ngulur waktu (*procastinate*), menawar (*bargain*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain.

Bentuk-bentuk interaksi berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral internasional. Adapun yang dimaksud dengan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antar dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut dibedakan menjadi pola kerja sama, persaingan dan konflik.

Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut.

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Ditengah arus globalisasi yang berhasil mendobrak tabu kultural dan sekat geografis, sangat memungkinkan untuk terjadinya hubungan antar negara secara luas. Dalam hubungan tersebut, tidak hanya antara suatu negara dengan negara lain yang secara geografis berdekatan, tetapi juga dengan negara-negara lain yang berjauhan karena tingkat urgensitas kebutuhan yang

memerlukan akses lintas negara. Apalagi kemajuan dibidang teknologi komunikasi, informasi dan transportasi diabad modern ini sangat pesat, sehingga hubungan yang dibangun menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Dalam mempraktekkan hubungan bilateral, diperlukan saluran politik luar negeri sebagai instrumen politik untuk mencapai kepentingan negara yang bersangkutan. Bidang ekonomi merupakan salah satu sektor penting dalam konteks hubungan bilateral sebagai instrumen politik luar negeri. Realitas ketergantungan dibidang ekonomi berimplikasi terhadap keharusan adanya kerja sama ekonomi dalam kerangka hubungan bilateral. Dalam hal ini, relasi antara ekonomi dan politik bisa dilihat dalam konteks kebijakan politik yang bisa mempengaruhi interaksi ekonomi maupun sebaliknya.

Hubungan antar negara-negara diatur oleh sifat dari negara-negara itu sendiri maupun oleh masyarakat internasional. Dalam hal ini, negara sebagai organisasi formal suatu bangsa memiliki otoritas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain sesuai aturan hukum dan kultur politik suatu negara. Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional, dalam hal penyelenggaraan hubungan antar negara harus memperhatikan tata krama politik internasional.

Dalam interaksi antar negara-negara tidak terdapat pemisahan yang jelas antar sahabat dan musuh, antara bujukan dan paksaan. Dalam banyak hal, hubungan mencakup unsur-unsur yang beraneka ragam bahkan yang bertentangan atau ancaman, pemakaian sekali-sekali menyelinap ke hubungan

yang sangat bersahabat sekalipun, dan bahkan dua lawan ideologi yang bernafsu bisa berkompromi dalam hal perdagangan. Dalam hubungan antar negara, kadang-kadang kepentingan pragmatis melampaui hal-hal yang normatif bahkan ideologis. Tetapi tidak berarti bahwa negara harus bertindak diluar norma yang ada. Fleksibelitas dalam memaknai norma suatu negara menjadi penting, agar kepentingan bangsa dan negara dalam berhubungan dengan negara lain tercapai.

Hubungan antar negara memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam memperluas jaringan dengan berbagai negara-negara terkait dalam struktur internasional. Independensi suatu negara sangat penting, tetapi tidak berarti harus mengisolasi dan memarjinalkan diri dari pergaulan internasional. Jika suatu negara dihadapkan dengan masalah domestiknya, maka secara otomatis negara yang bersangkutan membutuhkan bantuan dan dukungan dari negara-negara lain melalui instrumen hubungan bilateral maupun diplomasi ditingkat forum-forum internasional.

Realisasi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama Haji dan Umrah yang dilakukan Indonesia dan Arab Saudi diwujudkan melalui saluran keagamaan sebagai bentuk hubungan formal antar kedua negara. Kerja sama dibidang jasa Haji dan Umrah memang sesuai dengan 3 motif yang dikemukakan oleh Spiegel dalam pelaksanaan hubungan bilateral, yakni antara Indonesia dan Arab Saudi yang melakukan kerja sama dibidang jasa Haji dan Umrah bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

### ➤ Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Salah satu negara yang telah terlebih dulu mengaplikasikan konsep ini kedalam kebijakan-kebijakan luar negerinya adalah Australia. Salah satu contoh penggunaan konsep hubungan bilateral Australia adalah pada kerja sama penanggulangan terorisme internasional yang dibahas pada pertemuan bilateral Indonesia dan Australia di Vientiane, Laos pada 8 September 2016 (Pertemuan Puncak Asia Timur ke 11) akan pentingnya peningkatan kerja sama keamanan tentang penanggulangan terorisme melalui *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*.

Sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah memiliki hubungan diplomatik, kerja sama formal (khususnya dalam bidang konservasi ikan, penegakan hukum, dan keadilan), kerja sama keamanan, perluasan hubungan perjanjian, keanggotaan bersama di forum regional, dan keanggotaan bersama disejumlah perjanjian multilateral. Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh setiap tahun.

Pada tahun-tahun terakhir, komitmen bantuan Australia semakin besar untuk Indonesia, dan Australia telah menjadi destinasi pendidikan populer bagi pelajar Indonesia. Pada tahun 2008-2009, Indonesia merupakan penerima bantuan terbesar Australia dengan nilai AUD 462 juta.

Selain itu, contoh lain dari penerapan hubungan bilateral adalah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Federasi Rusia, yang mencakup tiga pilar: politik dan keamanan; ekonomi, perdagangan dan investasi, serta sosial budaya.

Dalam bidang ekonomi, kedua negara berkomitmen memajukan proyek pengembangan dan investasi strategis diberbagai sektor seperti infrastuktur, energi, dan transportasi. Sementara itu, pertukaran orang ke orang dan pertukaran budaya antara kedua negara juga telah menguat selama bertahun-tahun. Terlebih, dengan adanya peluncuran operasional penerbangan langsung Rossiya Airlines dengan rute Moskow ke Bali telah meningkatkan jumlah wisatawan Rusia hingga 24,4% pada february 2019.

### **A.3. Penerapan Konsep Hubungan Bilateral Di Arab Saudi**

Indonesia dan Arab sudah sejak lama berkerja sama diberbagai bidang, mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di Dunia. Hubungan bilateral pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia yang telah terjalin dari tahun 1947-an hingga saat ini, dimaksudkan untuk mempererat kerja sama dibidang tertentu, dengan prinsip saling menghargai, menghormati dan menguntungkan, dalam perjalanannya hubungan ini berjalan dengan baik. Kunjungan yang terus menerus dilakukan oleh pihak kerajaan Saudi dan pemerintah Indonesia tentunya telah membawa warna tersendiri dan memberi sinyal positif bagi penguatan hubungan diplomatik ini.

Kerja sama bilateral dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah merupakan salah satu penerapan hubungan bilateral di Arab Saudi. Dengan pemerintah Arab Saudi menerima banyaknya jemaah Haji dan Umrah dari seluruh dunia membuktikan bahwa Arab Saudi telah menjalankan hubungan bilateral dengan banyak negara di dunia khususnya negara berpenduduk

muslim. Arab Saudi yang telah bertahun-tahun bergantung pada sektor minyak bumi juga telah melakukan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara Barat yang membutuhkan minyak bumi dalam kelangsungan hidup.

Dalam visi Arab 2030 pemerintah Arab Saudi semakin membuka diri terhadap dunia internasional guna menyukseskan visi Arab Saudi 2030, dan secara langsung pemerintah Arab Saudi juga melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia dalam kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Perubahan besar-besaran di Arab Saudi yang menjadi visi negara itu di tahun 2030, tidak akan kebablasan. Perubahan tersebut tetap berlandaskan Islam, dan membawa masa depan lebih baik bagi Saudi, baik dibidang ekonomi, maupun pariwisata di tahun 2030. Beberapa tahun mendatang kita akan dapatkan Arab Saudi yang luar biasa berbeda.

Perubahan yang dilakukan masih dalam tahap wajar dan berjalan alami. Arab Saudi sebagai pusat lahirnya Islam, dan akan tetap menjaga identitas keIslamannya. Pemerintah Saudi akan tetap mengikuti kaidah agama dan tidak akan melompat jauh. Arab Saudi adalah negara yang moderat dan menjadi negara yang lebih terbuka pada perbedaan.

#### **A.4. Penerapan Konsep Hubungan Bilateral Di Indonesia**

Indonesia memiliki populasi muslim terbanyak di dunia dan merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia secara hati-hati mempertimbangkan kepentingan solidaritas Islam dalam keputusan kebijakan luar negerinya, namun pada umumnya selalu menjadi pengaruh pertimbangan di OKI. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membentuk

hubungan baik dengan Israel dan pada bulan Agustus 2000, ia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Akan tetapi, hingga Januari 2006, belum ada hubungan diplomasi formal antara Indonesia dan Israel. Karena itu, Indonesia bersama Malaysia, membina hubungan luar negerinya dengan Israel melalui Singapura.

Setelah 1966, Indonesia menyambut dan membuat hubungan dekat dengan negara-negara pendonor, terutama Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Jepang, melalui *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI) dan penggantinya, *Consultative Group on Indonesia* (CGI), yang telah menyediakan bantuan ekonomi asing dalam jumlah besar. Masalah di Timor Leste dan keengganan Indonesia untuk menerapkan reformasi ekonomi telah memperumit hubungan Indonesia dengan negara pendonor.

Dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, Indonesia menerima dan menyambut niat baik pemerintah Arab Saudi yang akan melakukan kerja sama guna mewujudkan visi Arab 2030. Indonesia merupakan objek guna menerapkan kebijakan luar negeri Arab Saudi untuk menyukseskan visi Arab 2030. Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di Indonesia telah menjadi kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama ini berlandaskan kepentingan nasional Indonesia dan Arab Saudi.

#### **A.5. Tujuan Konsep Hubungan Bilateral (Teori Kerja Sama Internasional)**

Adapun beberapa tujuan dari kerja sama internasional antara lain sebagai berikut:

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
- b. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.

Ada banyak sekali tujuan kerja sama internasional. Adapun secara umum tujuan dari kerja sama internasional adalah mewujudkan perdamaian dunia serta kemakmuran dunia. Namun tujuan tersebut bisa dijabarkan kembali ke dalam uraian yang lebih rinci.

Adapun beberapa tujuan dari kerja sama internasional antara lain sebagai berikut:

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara
- b. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia
- c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya
- d. Memperluas lapangan kerja
- e. Memperkuat rasa persahabatan

#### **A.6. Landasan Teori**

Penulis menggunakan teori Saling Ketergantungan atau *Interdependensi Theory*, berdasarkan konsep hubungan bilateral.

Teori Saling Ketergantungan atau *Interdependensi Theory* yang dicetuskan oleh John Thibout dan Harold Kelley, yaitu saling ketergantungan disebabkan oleh kerja sama yang saling dilakukan oleh dua negara. Dalam hal kerja sama bilateral penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, Indonesia sangat bergantung kepada Arab Saudi yang memiliki 2 kota suci Mekah dan Madinah, serta adanya Kakbah sebagai kiblat dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan Arab Saudi juga bergantung kepada Indonesia yang memiliki muslim terbesar di dunia.

Memang benar bahwa sumber kekayaan negara Arab Saudi adalah dari minyak bumi, dengan Arab Saudi melakukan kerja sama dengan negara negara barat seperti Amerika Serikat sudah tentu menghasilkan defisa yang sangat banyak bagi negara Arab Saudi. Namun, kita ketahui bersama bahwa minyak bumi yang digunakan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan manusia sudah tentu bisa berkurang dan habis, serta harga minyak bumi cenderung tidak stabil dan bahkan merosot. Maka, pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan suatu kebijakan dalam visi Arab 2030 yang merupakan transformasi pemerintah Arab Saudi untuk melakukan kerja sama dibidang lain salah satunya dibidang keagamaan dan jasa yakni Haji dan Umrah.

Teori saling ketergantungan memiliki beberapa komponen yang mendasari, yaitu:

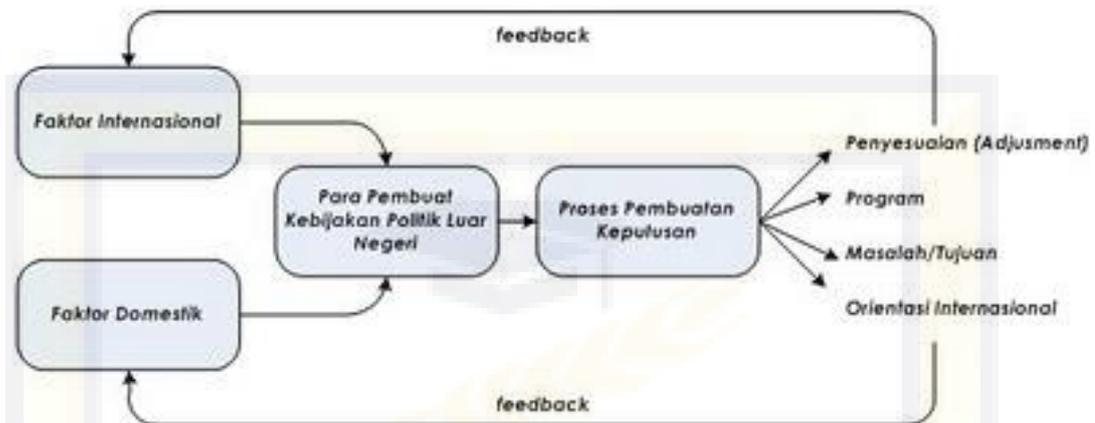
1. Outcome (Kepuasan)
2. Komitmen
3. Level Dependensi (Level Ketergantungan)

## **B. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri suatu negara, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dibidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerja sama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.

Biasanya, tugas menciptakan kebijakan luar negeri adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri atau jabatan yang setara. Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Prancis dan Finlandia, dimana kepala negara adalah yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, kepala negara yaitu Presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.

### Skema pembuatan kebijakan luar negeri



Terdapat 2 faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri: Faktor internasional dan faktor domestik. Kedua faktor ini digunakan sebagai basis pertimbangan oleh para pembuat kebijakan politik luar negeri, yang melakukan proses pembuatan keputusan. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa penyesuaian, program, masalah, tujuan, dan orientasi internasional.

#### a. Faktor Internasional

Faktor-faktor internasional yang diperhatikan para pembuat kebijakan luar negeri di antaranya adalah (Eidenfalk, 2006: 6-7):

1. Faktor Global, berkaitan dengan perubahan sistem politik internasional yang punya dampak global dan juga negara dalam konteks pembuatan kebijakan luar negeri.
2. Faktor Regional, berkaitan dengan lembaga-lembaga regional (yang terdiri atas negara) yang punya dampak tertentu atas formasi kebijakan luar negeri suatu negara. Ini juga termasuk norma-norma yang disepakati di

dalam suatu regional khusus yang harus dipertimbangkan tatkala suatu negara menentukan politik luar negerinya.

3. Hubungan Bilateral, berkaitan dengan hubungan bilateral antar aktor negara juga lembaga-lembaga tingkat global ataupun regional. Aktor-aktor tersebut dapat mempengaruhi negara suatu negara dengan menggunakan metode aliansi, perdagangan, juga ancaman ekonomi dan militer.
4. Aktor-aktor non negara, aktor-aktor transnasional seperti jaringan kriminal, jaringan teroris, perusahaan multinasional, dan organisasi hak asasi manusia, memainkan peran yang mampu membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

#### **b. Faktor Domestik**

Faktor-faktor domestik yang diperhatikan para pembuat kebijakan luar negeri adalah:

1. Birokrasi, birokrasi kerap diidentikan dengan kelambatan kerja dalam mengadaptasi perubahan politik luar negeri, tetapi cenderung terdapat satu kelompok didalam birokrasi yang punya akses pada pejabat tinggi yang efektif mengusahakan perubahan kebijakan.
2. Opini Publik, opini publik menjadi penting tatkala pejabat pemerintah butuh dukungan pemilih dalam rangka menerapkan suatu kebijakan serta agar terpilih kembali.
3. Media, media berperan penting dalam *mensetting* agenda, dan membentuk opini publik; media menyediakan informasi dari pemerintah ke publik; media dapat menjadi investigator, menyediakan informasi baru bagi

pemerintah juga publik, yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri.

4. Kelompok Kepentingan, kelompok kepentingan adalah kelompok yang terorganisir, yang terlibat dalam sejumlah aktivitas pengambilan keputusan pemerintah. Kelompok ini termasuk yang dibentuk warganegara, diorganisir berdasarkan isu-isu khusus, lobi-lobi bisnis, profesional, dan firma-firma hukum publik.
5. Partai Politik, partai politik yang memberikan dukungan pada pemerintah, ataupun untuk meneruskan atau mengubah politik luar negeri.

#### **B.1. James N. Rosenau**

Kebijakan luar negeri adalah tindakan otoritatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga aspek-aspek yang diinginkan maupun merubah aspek-aspek yang tidak diinginkan dari lingkungan internasional. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan dari segala aspek yang telah dikalkulasi sebelumnya agar dapat mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dalam kaitannya dengan Haji dan Umrah, pemerintah Arab Saudi melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan mengembangkan pada sektor jasa Haji dan Umrah guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga kepentingan nasional antara Indonesia dan Arab Saudi serta hubungan persahabatan diantara kedua negara yang memiliki hubungan erat dalam hal keIslaman.

## **B.2. K. J. Holsty**

*Foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated.*

Hal ini dimaksudkan, politik luar negeri sebagai suatu analisis keputusan negara terhadap keadaan lingkungan pada kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi di dalam negara terlebih dahulu untuk bertindak dan merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Dalam hal ini hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah, politik luar negeri Arab Saudi terbentuk kedalam suatu kebijakan yang tertuang pada visi Arab Saudi 2030. Visi Arab 2030 merupakan kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Indonesia, didalam visi Arab 2030 terdapat banyak kebijakan Arab Saudi terhadap Indonesia mulai dari penambahan kuota haji, fasilitas *fast track*, hingga pelayanan bagi jemaah Haji asal Indonesia di Arab Saudi. Keputusan pemerintah Arab Saudi yang menargetkan 30 juta jemaah Umrah di tahun 2030 juga merupakan politik luar negeri Arab Saudi kepada seluruh negara beragama Islam dan penambahan kuota Haji menjadi 221.000 jemaah untuk kuota jemaah Haji Indonesia juga merupakan kebijakan luar negeri Arab Saudi terhadap Indonesia.

## **C. Konsep Politik Luar Negeri (Konsep Kepentingan Nasional)**

Politik luar negeri adalah seperangkat maksud, tatacara, dan tujuan, yang diformulasikan oleh orang-orang dalam posisi resmi atau otoritatif, yang

ditujukan terhadap sejumlah aktor ataupun kondisi di lingkungan luar wilayah kekuasaan suatu negara, yang bertujuan mempengaruhi target tertentu dengan cara yang diinginkan oleh para pembuat keputusan.

Politik luar negeri itu mempunyai berbagai tujuan dan pertimbangan nilai yang merupakan landasan bagi politik internasional suatu negara. Tujuan tindakan negara dalam politik internasional, yaitu kepentingan nasional dan tujuan nasional yang bersumber dari negara, biasanya sudah dipostulasikan atau didalilkan secara apriori. Sebelum kebijakan dapat disusun, negarawan haruslah memahami dan menyesuaikan fakta-fakta permasalahannya dengan sistem konseptual yang dibentuk oleh kumpulan tujuan tersebut dengan sarana yang ada.

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan suatu negara, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah menentukan alat pembanding yang tepat. Hal ini bisa dilakukan dengan menjabarkan unsur-unsur fundamental yang terdapat dalam politik luar negeri. Politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat dilihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit suatu negara, sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan.

Kepentingan nasional dari Indonesia, yaitu adanya kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, ketertiban, keamanan, dan kecerdasan bagi kehidupan bangsa. Kepentingan nasional mengandung nilai-nilai yang merupakan dasar bagi usaha kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, dan untuk ini perlu disusun strategi yang merumuskan pangkalan dan sasaran, serta gagasan gerak dari pangkalan menuju sasaran. Sasaran ini dapat dibagi dalam sasaran jangka panjang (*long range objectives*), sasaran jangka menengah (*middle range objectives*), dan sasaran jangka pendek (*short range objectives*).

Sasaran dari hubungan dan politik luar negeri adalah juga menciptakan kondisi yang ingin dicapai melalui diplomasi untuk jangka waktu tertentu pula. Hubungan luar negeri dalam hal ini dapat kita artikan sebagai upaya pemerintah bersama dengan negara-negara asing serta organisasi-organisasi internasional dan regional guna tercapainya pergaulan dunia yang merdeka dan bersahabat, agar terdapat keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, menuju keperdamaian, keadilan, dan kemakmuran bersama. Sedangkan, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa.

Kepentingan nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan

dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*security*) dari kesejahteraan (*prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan tujuan nasional. Contohnya kepentingan pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "kepentingan nasional"

Menurut Morgenthau:

"Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerja sama atau konflik".

### **C.1. Walter Carlsnaes**

“Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang berdaulat”.

### **C.2. K. J. Holsti**

*Foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated.*

Hal ini dimaksudkan, politik luar negeri sebagai suatu analisis keputusan negara terhadap keadaan lingkungan pada kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi di dalam negara terlebih dahulu untuk bertindak dan merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

### **C.3. Mark R. Amstutz**

*Foreign policy as the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries.*

Pada defenisi ini, menekankan pada tindakan dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional negaranya agar dapat

mempromosikan kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri ini merupakan konsep yang digunakan pemerintah atau negara maupun non pemerintah untuk merencanakan dan berkomitmen untuk menjadi pedoman dalam berhubungan dengan pihak-pihak lain di lingkungan eksternal.

Politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri sebagai cerminan politik dalam negeri, sehingga apabila politik domestiknya tidak ada arah yang jelas dan banyak mengandung ketidakpastian di tingkat nasional, akan sulit merefleksikan pada tingkat internasional.

Selain itu, politik luar negeri suatu negara senantiasa di dalamnya mengandung dua unsur yang saling berinteraksi, yaitu ketetapan dan perubahan. Unsur ketetapan ini biasanya meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara itu, serta prinsip-prinsip bernegara yang disepakati, sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan strategis, prioritas dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

#### **C.4. Penerapan Konsep Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Presiden Soekarno**

Pada masa Soekarno, kepentingan nasional utama bagi bangsa Indonesia adalah pengakuan akan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa (*national building*). Kepentingan nasional ini diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang selain bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan bangsa, juga ditujukan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

Dengan kebijakan tersebut, maka terlihat wajar jika pada masa Soekarno, Indonesia menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan negara-negara Asia Afrika yang baru terbebas dari penjajahan. Kerja sama erat dengan negara-negara Asia Afrika ini terutama tampak pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung ini kemudian dijadikan salah satu prinsip/norma pergaulan internasional yang diterapkan secara luas dalam hubungan internasional dewasa ini.

Implementasi kedua dari kepentingan nasional masa Soekarno adalah menunjukkan karakter bangsa Indonesia pada negara-negara lain. Karakter bangsa yang ditonjolkan Soekarno adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, yang tidak bersedia berada dibawah tekanan bangsa lain, dan memiliki suatu wawasan sendiri tentang pergaulan antar bangsa. Kepentingan nasional ini menjadi prioritas utama pada masa Soekarno

ketika pembangunan karakter bangsa bersinggungan dengan masalah kedaulatan teritorial Indonesia dalam masalah pembebasan Irian Barat.

Karena kekecewaan yang timbul terhadap negara-negara Barat dalam masalah pembebasan Irian Barat, Soekarno mengembangkan suatu gagasan tentang kebangkitan kekuatan baru (*New Emerging Forces*) yang hendak merombak tatanan dunia yang dikuasai oleh negara-negara Barat.

### **C.5. Penerapan Konsep Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Presiden Soeharto**

Pada masa Soeharto, kepentingan nasional di bidang ekonomi lebih diprioritaskan tanpa melupakan stabilitas politik yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Elit kepemimpinan nasional lebih didominasi oleh para teknokrat yang memprioritaskan perbaikan ekonomi domestik melalui program pembangunan yang mengkombinasikan stabilitas dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Pada dasarnya penerapan politik luar negeri yang dijalankan Indonesia sangat bergantung pada tiga hal, yaitu (1) peran Indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasionalnya; (2) hubungan Indonesia dengan aktor-aktor (*state actor* atau *non-state actor*) lain di dunia internasional, terutama pada aktor-aktor yang dapat memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia; (3) citra Indonesia di dunia internasional.

## **C.6. Tujuan Dan Sarana Dalam Politik Luar Negeri**

Pembentukan kepentingan nasional adalah langkah pertama, meskipun masih abstrak sifat konsepnya dalam merumuskan politik luar negeri. Sebelum konsep dipakai sebagai tuntunan tindakan, sang negarawan harus menghadapi suatu masalah klasik, yaitu menyesuaikan tujuan dengan sarana yang ada.

Dalam situasi kebijakan khusus, salah satu masalah yang paling sulit bagi para pembuat kebijakan adalah menentukan hubungan yang tepat antara tujuan abstrak dengan sarana konkretnya. Dalam teori, tujuan itu menentukan sarana atau cara. Dalam situasi yang memungkinkan dilakukannya berbagai macam tindakan, haruslah memilih salah satu yang langsung mendekati tercapinya kepentingan nasional. Tetapi, dalam praktek selalu terdapat gairah untuk membiarkan sarana menentukan tujuan, dan untuk mencapai lebih dahulu tujuan yang paling mudah.

Sarana untuk tujuan antara adalah tujuan yang bilamana tercapai akan dijadikan sarana untuk melanjutkan usaha mencapai tujuan-tujuan berikutnya. Tujuan antara ini yang dimaksudkan hanya untuk digunakan sebagai sarana bagi tujuan-tujuan lebih lanjut, biasanya cenderung pula memperoleh relevansi mutlak dalam dirinya sendiri sebagai tujuan.

## **C.7. Indikator Politik Luar Negeri Menurut William D. Coplin**

a. Pertama, adalah konteks internasional. Artinya situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat memengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. Dalam kaitan

ini, Coplin lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografi, ekonomi, dan politik.

Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi geografi dan dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, serta hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lainnya. Geografi merupakan sesuatu yang konstan keberadaannya. Sebagaimana halnya geografi, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam menentukan kebijakan politik luar negeri. Melalui faktor ini arus barang dan jasa dapat memengaruhi pendukung ketergantungan antara satu negara dengan negara lain.

- b. Kedua, yang menjadi determinan dalam politik luar negeri adalah perilaku para pengambil keputusan. Dalam hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara di suatu pemerintahan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan individu-individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri.
- c. Ketiga, kondisi ekonomi dan militer, kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat memengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain.
- d. Keempat, determinan terakhir yang memengaruhi politik luar negeri yakni, politik dalam negeri. Melalui perspektif ini yang ingin dilihat,

adalah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Profil Negara Republik Indonesia**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebanyak 17.508 pulau dengan keseluruhan luas wilayahnya adalah sebesar 1,904,569 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau utama Indonesia adalah pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Sulawesi dan pulau Papua. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Secara astronomis, Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Benua Australia ini terletak diantara 6°LU-11°08'LS dan dari 95°BT-141°45'BT. Selain diapit oleh dua benua, Indonesia juga berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia berbatasan darat dengan negara Papua Nugini di pulau Papua, Malaysia di pulau Kalimantan dan Timor Leste di pulau Timor. Sedangkan negara yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia dan India atau kepulauan Andaman dan Nikobar.

Indonesia memiliki populasi sebanyak 260.580.739 jiwa estimasi Juli 2017 dengan mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam sekitar 87,2%. Jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia sekaligus

juga merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia sekitar 227 juta jiwa penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

Dalam bentuk pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial yang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya dipegang oleh seorang Presiden. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih langsung oleh rakyat Indonesia melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) diselenggarakan 5 Tahun sekali. Nama lengkap Indonesia adalah Republik Indonesia dengan Ibukotanya adalah kota Jakarta.

Dihubungan luar negeri, Indonesia merupakan negara anggota PBB dan negara anggota lembaga-lembaga yang berada dibawah PBB. Republik Indonesia juga merupakan negara anggota APEC, ASEAN, G-20, ADB, OKI, IORA dan organisasi-organisasi Internasional lainnya. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di benua Asia. Negara Indonesia ini juga menjadi bagian dari salah satu negara di ASEAN. Negara yang pernah dijuluki sebagai negara maritim ini, ternyata pernah memiliki peristiwa sejarah yang cukup menggemparkan kehidupan rakyat Indonesia. Salah satunya tentang peristiwa G-30 S PKI.

Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara daratan Asia Tenggara dan Australia dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, Papua Nugini di pulau Papua, dan Timor Leste di pulau Timor.

Dengan 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan total populasi 265 juta orang pada tahun 2018, itu adalah negara terpadat keempat dan negara muslim terbesar di dunia.

## **B. Profil Negara Arab Saudi**

Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah salah satu negara penghasil dan pengeksport minyak terbesar di dunia yang berada di kawasan dan pengeksport minyak terbesar di dunia yang berada di kawasan Asia Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara yang mencakup hampir seluruh semenanjung Arabia dan memiliki nama lengkap *Kingdom of Saudi Arabia* (Kerajaan Arab Saudi) ini memiliki luas wilayah sebesar 2.149.690 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 28.571.770 jiwa sesuai data tahun 2017. Mayoritas penduduknya adalah etnis Arab yang beragama Islam. Bahasa resmi Arab Saudi adalah bahasa Arab.

Secara geografis, Arab Saudi terletak di antara 15°LU-32°LU dan antara 34°BT-57°BT dan berbatasan dengan Irak, Kuwait dan Yordania di sebelah utaranya. Disebelah selatan, Arab Saudi berbatasan dengan Republik Yaman dan Kesultanan Oman sedangkan di sebelah timurnya adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Teluk Persia. Sebelah barat Arab Saudi adalah Laut Merah.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Arab Saudi adalah sistem pemerintahan Monarki Absolut yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Raja. Ibukota Arab Saudi adalah Riyadh. Kerajaan Arab Saudi merupakan negara anggota PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), G-20 dan OPEC.

Arab Saudi (Arab: السعودية العربية المملكة), secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau *Kingdom of Saudi Arabia* (KSA), adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km<sup>2</sup>, Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Arab Saudi berbatasan langsung dengan Yordania dan Irak ke utara, Kuwait ke timur laut, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab ke timur, Oman ke tenggara, dan Yaman ke selatan. Negara ini terpisah dengan Israel dan Mesir oleh Teluk Aqaba. Negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia, dan sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir.

Wilayah Arab Saudi kini merupakan bekas dari empat wilayah distrik: Hejaz, Najd, bagian dari Arabia Timur (Al-Ahsa) dan Arabia Selatan ('Asir). Kerajaan Arab Saudi didirikan pada 1932 oleh Ibnu Saud. Dia mempersatukan empat wilayah kedalam sebuah negara tunggal menjadi sebuah rangkaian penaklukan yang dimulai pada 1902 dengan ibu kotanya di Riyadh, rumah asal keluarganya, Wangsa Saud. Arab Saudi adalah negara monarki absolut, dengan petunjuk syari'ah Islam. Arab Saudi juga kadangkala disebut dengan "Tanah Dua Masjid Suci" yang merujuk kepada Masjidil Haram di Mekkah, dan Masjid Nabawi di Madinah, dua tempat paling suci dalam agama Islam. Kerajaan memiliki total populasi sebanyak 28,7 juta jiwa, dengan 20 juta diantaranya adalah bangsa Saudi dan 8 juta lainnya merupakan warga negara asing. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab.

Petroleum ditemukan di Arab Saudi pada 03 Maret 1938 dan diikuti ditemukannya ladang-ladang minyak lain di Provinsi Timur. Arab Saudi merupakan negara produksi dan pengeksport minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar keenam di dunia. Kerajaan dikategorikan oleh Bank Dunia dengan sebuah Indeks Pembangunan Manusia, dan merupakan satu-satunya negara Arab yang menjadi anggota dari Ekonomi Utama G-20.

Negara ini seringkali mendapat kritik karena hal hak-hak perempuan dan penggunaan hukumannya. Arab Saudi adalah sebuah negara monarki otokrasi, dengan jumlah pengeluaran keuangan militer tertinggi keempat di dunia, dan pada tahun 2010-2014, SIPRI menemukan bahwa Arab Saudi merupakan importir senjata terbesar kedua di dunia. Arab Saudi dapat dipertimbangkan sebagai negara adidaya wilayah dan adidaya menengah. Negara ini ditambahkan kedalam GCC, negara ini juga merupakan anggota aktif dalam Organisasi Kerja sama Islam dan OPEC.

Arab Saudi terkenal sebagai negara tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusanNya".

Arab Saudi menggunakan sistem Kerajaan atau Monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman salafush shalih para sahabat Nabi dan yang mengikuti mereka dengan baik dan secara umum bermazhab Hambali.

Pemahaman ini sebagai pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur'an dan Hadits, sehingga sering menyebutnya sebagai pemahaman Salafi. Memiliki hubungan internasional dengan negara-negara lain, baik negara-negara Arab, dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam.

### **C. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah**

Dalam penyelenggaraannya, ibadah Haji tidak saja hanya merupakan kewajiban agama yang merupakan tanggung jawab individu ataupun masyarakat muslim, melainkan merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Oleh karena itu, kegiatan penyelenggaraan ibadah Haji menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah Haji.

Untuk menunjang pelaksanaan pemberangkatan dari tanah air dan pelaksanaan ibadah Haji di Arab Saudi, pemerintah bahkan telah membuat berbagai macam kebijakan dan aturan petunjuk operasional pelaksanaan pengurusan jemaah di daerah-daerah. Undang-Undang No.13 tahun 2008 bahkan mengatur secara tegas manajemen pelayanan dan administrasi pelaksanaan ibadah Haji di tanah air.

Peranan negara dalam penyelenggaraan Haji bertujuan mengontrol dan mengawasi. Terdapat ketakutan pemerintah terhadap peranan ibadah Haji dalam mewujudkan persatuan muslim seluruh dunia. Peranan pemerintah itu kemudian mengalami perubahan yang mendasar ketika Indonesia merdeka. Peranan

pemerintah tidak lagi bertujuan mengawasi dan mengontrol, tetapi lebih diarahkan kepada melayani dan melindungi. Dalam implementasi, bentuk pelayanan dan perlindungan dalam keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah Haji dari berbagai aspeknya berupa regulasi penyelenggaraan Haji, ongkos naik Haji, pemondokan, transportasi, penentuan tarif penerbangan, profesionalisasi petugas Haji dan katering jemaah.

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan Haji dari tahun ke tahun, menuntut lahirnya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial seperti, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta adanya pengawasan guna mencapai penyelenggaraan Haji yang aman, lancar, aman, tertib, teratur dan ekonomis. Secara singkat dapat dikatakan manajemen Haji diperlukan untuk terciptanya penyelenggaraan Haji yang efektif, efisien dan rasional. Secara garis besar, manajemen Haji itu dihadapkan pada enam tugas pokok, yakni:

1. Membangun hubungan kenegaraan, dalam ranah diplomatik dengan negara tujuan Haji, yakni Saudi Arabia.
2. Menyusun rencana dan program agar berada dalam bingkai tujuan dan misi pelaksanaan Haji secara keseluruhan.
3. Bertanggungjawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan Haji
4. Menyelenggarakan operasional Haji dengan aman
5. Mengakomodasi perbedaan keagamaan yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jemaah Haji dengan porsi yang terbatas

6. Pelestarian nilai-nilai dalam ikatannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia, transisi terhadap kondisi manajemen publik ini mulai dilakukan setelah masa pemerintahan baru pasca Orde Baru. Beberapa departemen pemerintah melakukan proses reformasi birokrasi dengan menggunakan atau menerapkan paradigma baru prinsip manajemen dan administrasi publiknya, termasuk pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh departemen-departemen pemerintahan di Indonesia telah menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan, walaupun banyak hambatan dalam prosesnya. Meskipun menyisakan banyak persoalan, reformasi birokrasi paling tidak merupakan pemicu awal untuk menata manajemen dan administrasi publik milik negara yang kala masa Orde Baru terkesan lamban dan tidak profesional melayani kepentingan publik. Meskipun dengan susah payah merubah *mindset* para penyelenggaranya, terutama para pegawai negeri yang senior, namun sedikit demi sedikit perbaikan mulai terasa.

Indonesia dalam prosesnya sebagai penyelenggara ibadah Haji mempunyai mekanisme dalam pengaturan hal tersebut. Berupa pengeluaran regulasi, pengorganisiran kuota jemaah, pendaftaran, pengelolaan transportasi, pemondokan, sistem informasi dan dokumentasi, pelayanan kesehatan, mutu pelayanan, sistem monitoring dan evaluasi hingga langkah-langkah nyata perbaikan.

Urusan Haji di Indonesia dipercayakan kepada Kementerian Agama (Kemenag) sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kementerian ini bertugas

sebagai pelaksana sekaligus pengawas pelaksanaan ibadah Haji di tanah air. Kemenag bertindak sebagai pemain sekaligus wasit atau *controller* dalam persoalan ini. Sehingga fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh kementerian ini begitu kompleks. Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan Undang-Undang pelaksanaan Haji sebagai landasan yuridis formal yang dipakai sebagai bahan rujukan semua pihak, terutama Kemenag yang menjadi *person in charge* atau pelaksana utama dalam urusan ini. Undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Haji diperbaiki sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan reformasi sosial politik di tanah air yakni UU nomor 13 tahun 2008.

Pembaharuan ini dilakukan seiring dengan beberapa aspek yang perlu diperjelas dan diurus. Undang-undang inilah yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan manajemen pelayanan dan administrasi publik Haji yang akan diurus. Profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan menjadi kunci utama untuk memenuhi azas dan tujuan penyelenggaraan Haji ini sendiri, jika kita menginginkan manajemen dan administrasi publik yang handal dan berhasil guna.

Pada masa orde baru pemerintahan memiliki hak penuh atas penyelenggaraan ibadah Haji yang terpusat di Departemen Agama dan Direktur Jenderal Urusan Haji dan Umrah. Upaya peningkatan yang dilakukan pada masa itu yaitu:

1. Penyempurnaan pola pembinaan dan bimbingan jemaah Haji dengan pengadaan pelatihan calon jemaah Haji sesuai kebutuhan.
2. Peningkatan keikutsertaan ormas Islam terutama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dalam pembinaan dan bimbingan calon jemaah Haji.

3. Penyempurnaan materi pembinaan dan bimbingan termasuk pendalaman kondisi obyektif Arab Saudi pada musim Haji.
4. Pengusahaan adanya fatwa MUI tentang ibadah Haji sekali seumur hidup serta ibadah Umrah di bulan ramadhan.

Inti pokok pada peran pemerintah dan proses penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah telah diatur dan memiliki landasan hukum yang tertuang pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 pasal 20, 21, dan 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### **D. Peran Pemerintah Arab Saudi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah**

Peran pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah tertuang di dalam Taklimatulhaji. Taklimatul Hajj adalah peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Peraturan ini merupakan panduan bagi misi dan jemaah Haji yang mengacu pada UU yang berlaku pada Kerajaan Arab Saudi. Di dalam Taklimatul Hajj disebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi berkewajiban memberikan bantuan dan memfasilitasi pelaksanaan ibadah Haji dengan mencurahkan semua kemampuan dan seluruh sumber daya manusia demi memudahkan kedatangan dan perlindungan jemaah Haji, baik kedatangan maupun kepulangan.

## **E. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Haji Dan Umrah**

Beberapa poin penting yang terdapat pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 2019 atas perbaikan dari Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Prioritas keberangkatan bagi jemaah Haji usia lanjut, usia paling rendah 65 tahun.
- 2) Adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi jemaah Haji penyandang disabilitas.
- 3) Hak jemaah Haji dalam hal nomor porsi dan keberangkatan Haji tidak hilang. Artinya, pelimpahan porsi keberangkatan bagi jemaah Haji yang telah ditetapkan berhak melunasi biaya perjalanan ibadah Haji pada tahun berjalan kepada suami, istri, ayah, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk. Dan disepakati secara tertulis oleh keluarga, dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.
- 4) Pelimpahan porsi jemaah Haji dalam daftar tunggu atau *waiting list* yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada suami, istri, ayah, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.
- 5) Adanya jaminan perlindungan bagi jemaah Haji dan Umrah, sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum. Seperti penelantaran atau penipuan dari penyelenggara perjalanan ibadah Haji dan Umrah atau penyelenggaraan ibadah Haji khusus.

- 6) Adanya kepastian hukum fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Haji dan Umrah dengan memberi wewenang kepada menteri untuk membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyelenggara ibadah Haji dan Umrah yang bermasalah.
- 7) Adanya pengakuan tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana yang menyangkut penyelenggara ibadah Haji dan Umrah.
- 8) Jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara perjalanan ibadah Umrah, penyelenggaraan perjalanan ibadah Haji khusus dan kelompok bimbingan Haji dan Umrah. Dalam hal perizinan yang bersifat tetap melalui mekanisme pengawasan dengan kreditasi, serta pemberian sanksi administratif.
- 9) Adanya pengaturan yang memberi kemudahan pengurusan pengembalian uang bagi jemaah Haji meninggal dunia yang kemudian membatalkan keberangkatan atau dibatalkan keberangkatannya.
- 10) Sistem pengawasan yang komprehensif berupa keharusan penyelenggara umrah untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia. Tak hanya itu, kemampuan finansial dalam menyelenggarakan ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank berupa garansi dari perbankan atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.
- 11) Pengaturan pelayanan akomodasi dan pentingnya partisipasi masyarakat melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam mendukung kualitas pelayanan jemaah Haji dan Umrah.

12) Dalam rangka memastikan pemberian pelayanan, pemberian jaminan keberangkatan, kepulangan jemaah terdapat aturan sanksi bagi penyelenggara perjalanan Umrah dan Haji khusus yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik berupa sanksi administratif hingga pidana.

#### **F. Visi Arab Saudi 2030**

Visi Arab 2030 adalah transformasi pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak bumi, dengan mengembangkan sektor layanan umum, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata serta agama. Rincian visi ini diumumkan pada tanggal 25 April 2016 oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman. Pilar utama dari visi Arab Saudi 2030, yaitu pilar pertama adalah menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Kedua, determinasi sebagai kekuatan investasi global. Dan ketiga, mengubah Arab Saudi sebagai perantara bagi tiga benua yakni, Asia, Eropa dan Afrika.

Agenda pencakupan dari visi Arab 2030 adalah membangun 3 pilar, yakni sebuah semangat bermasyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan bangsa yang berambisi. Itu adalah gambaran dari kekuatan hakiki negara untuk membantu warganegara Arab mencapai aspirasi mereka.

Program-program realisasi visi untuk mencapai 96 sasaran strategis dari visi negara Arab Saudi 2030, dewan yang mengurus perkembangan dan ekonomi menetapkan 13 program realisasi visi:

1) Program kualitas kehidupan

- 2) Program perkembangan sektor keuangan
- 3) Program perumahan
- 4) Program keseimbangan keuangan
- 5) Program perubahan nasional
- 6) Program dana investasi publik
- 7) Program privatisasi
- 8) Program promosi perusahaan nasional
- 9) Program logistik dan perkembangan industri nasional
- 10) Program perkongsian strategis
- 11) Program Haji dan Umrah
- 12) Program perkembangan modal kemanusiaan
- 13) Program memperkaya karakter nasional.

Program realisasi visi Haji dan Umrah akan membolehkan jumlah yang tepat dari muslim untuk melakukan Haji dan Umrah secara penuh; memperkaya dan memperdalam pengalaman mereka melalui 2 masjid suci; mendapat pesan dari Islam; mengembangkan tempat turisme dan kebudayaan dunia; memberikan pelayanan terbaik dari sebelumnya, selama dan setelah kunjungan mereka ke Mekkah dan Madinah; dan mencerminkan kejayaan dan imej beradab dari Kerajaan dalam pelayanan dari 2 Masjid Suci. Dalam tambahan di atas, program ini akan menyajikan sebagai sebuah panggung untuk menegaskan hubungan dan peran efektif dari sektor privasi dalam meningkatkan sektor ekonomi.

### **G. Gambaran Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Untuk Mewujudkan Visi Arab 2030 Di Era Presiden Joko Widodo**

Sesuai visi Arab 2030, yaitu pemerintah Arab Saudi melakukan pengembangan di sektor jasa Haji dan Umrah dalam hubungan bilateralnya Arab Saudi menjadikan Indonesia sebagai mitra yang sangat penting dikarenakan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan antusias jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah ke Arab Saudi sangat besar, terbukti meski masa tunggu di Indonesia bisa mencapai 30 tahun atau lebih untuk menunaikan ibadah Haji tidak menurunkan semangat jemaah dalam melaksanakan ibadah ke tanah suci. Di Indonesia Haji dan Umrah telah menjadi kepentingan nasional, maka sangat penting pemerintah Indonesia mengatur dan melayani seluruh jemaahnya yang akan melaksanakan ibadah ke tanah suci, juga merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah guna memastikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh jemaah mulai dari urusan di dalam negeri seperti passport dan visa yang menjadi tugas keimigrasian, hingga urusan pemonddokan dan makanan jemaah selama di Arab Saudi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Haji dan Umroh dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Arab Saudi adalah negara yang sangat penting bagi peradaban dunia dan agama Islam karena dinegara ini memiliki peninggalan sejarah yaitu 2 masjid suci Haram dan Nabawi yang terletak di 2 kota suci yakni Mekkah dan Madinah. Sejak puluhan tahun lamanya Arab Saudi menggantungkan pendapatan ekonominya dari sektor minyak bumi, dan minyak bumi

menyumbangkan sekitar 50% pendapatan negara, namun harga minyak bumi yang merosot di tahun 2010 mendorong Arab Saudi melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor layanan umum, yakni sektor jasa Haji dan Umrah. Maka, sangat penting bagi Arab Saudi sebagai tuan rumah bagi umat muslim untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh jemaah dari penjuru dunia yang melaksanakan ibadah Haji dan Umrah ke tanah suci. Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama Haji dan Umrah juga dapat menjaga kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi kedua negara.

Pada era Presiden Joko Widodo, Raja Salman yang merupakan kepala negara Arab Saudi masih menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia karena kekerabatan diantara keduanya, yakni kedekatan dalam Islam. Hubungan ini memang harus terjaga dan terjalin harmonis karena Indonesia memang merupakan mitra yang sangat penting bagi Arab Saudi, tidak hanya pada kedekatan agama, namun juga perdagangan, budaya, sosial dan politik. Sektor jasa Haji dan Umrah merupakan kepentingan nasional Indonesia, maka sangat penting Indonesia meningkatkan kualitas pelayanan untuk seluruh jemaah Haji dan menjamin seluruh keamanan dan kenyamanan serta segala proses dalam beribadah Haji dan Umrah mulai dari tanah air hingga di Arab Saudi serta kepulangan kembali ke Indonesia. Sektor jasa Haji dan Umrah merupakan salah satu sumber pendapatan Arab Saudi yang sangat besar, bagi Indonesia sektor jasa Haji dan Umrah merupakan kepentingan nasional, maka penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan penyelenggaraan ini berjalan baik, karena ini juga merupakan martabat bangsa.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Kerja Sama Haji Dan Umrah Untuk Mewujudkan Visi Arab 2030 Di Arab Saudi Periode 2014-2019**

##### **A.1. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah**

Pemerintah Arab Saudi memiliki sebuah kementerian yang khusus untuk menangani dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Haji dan Umrah, yaitu Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kementerian yang saat ini dipimpin oleh Dr. Muhammad Saleh Benten, bertugas untuk memastikan keamanan, kontrol lalu lintas, transportasi, akomodasi, infrastruktur, dan layanan lain yang memang disiapkan untuk para jemaah.

Awalnya, kementerian ini didirikan pada 1381 H/1960 M dengan nama Kementerian Haji dan Wakaf yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh urusan Haji dan Wakaf, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid lainnya.

Pada 1414 H, sektor wakaf dipisah dan dijadikan kementerian tersendiri dengan nama Kementerian Keislaman, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan. Demikian juga dengan tugas pengawasan atas Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi serta pembuatan kiswah Kakbah dipisah dalam satu instansi sendiri, yaitu Lembaga Tinggi Urusan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Sektor yang tersisa kemudian dinamakan Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian ini bertugas untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah dan otoritas sipil untuk memfasilitasi kinerja ritual Haji dan regulasi layanan jemaah Haji melalui pengembangan sistem dan penggunaan teknologi dengan standar internasional agar tercipta suasana beribadah yang tenang, damai, dan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah Haji.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bertanggung jawab untuk mengatur mulai dari menyambut dan memproses administrasi jemaah Haji dari seluruh pintu masuk ke kerajaan Arab Saudi, baik darat, laut, maupun udara. Kementerian ini memastikan ketersediaan fasilitas penginapan dan transportasi yang layak bagi para jemaah Haji, memastikan dan mengawasi kinerja penyedia layanan Haji, mengawasi pelaksanaan ibadah Haji, mengatur kepulangan jemaah Haji, hingga membimbing jemaah Haji yang tersesat.

Selain itu juga bertanggung jawab untuk memberikan lisensi kepada sejumlah perusahaan dan lembaga penyedia layanan Haji. Untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya, setiap tahunnya Kementerian Haji bekerja sama dengan berbagai pihak swasta maupun pemerintah. Seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Dewan Pusat Pariwisata dan Tempat Bersejarah, lembaga keuangan, 17 perusahaan transportasi, 400 sektor layanan lapangan, dan 3.200 instansi pelayanan jemaah Haji internasional.

Sesuai dengan visi kerajaan 2030 dan inisiatif transformasi nasional 2020, Kementerian Haji dan Umrah terus memperbaiki dan memaksimalkan pelayanan ibadah Haji dengan cara:

1. Pembentukan pusat kontrol dan kontrol elektronik di Kementerian Haji dan Umrah dengan tujuan untuk menghubungkan pusat layanan jemaah dengan para pembuat keputusan, serta meningkatkan koordinasi antara para pihak yang terlibat dalam pelayanan ibadah Haji.
2. Meluncurkan proyek e-Sawara dan aplikasinya untuk membantu para jemaah Haji mengetahui informasi terkait ibadah Haji serta menyediakan data elektronik dan informasi untuk lembaga pemerintah yang mengurus ibadah Haji. Aplikasi ini dapat dinikmati mulai dari musim Haji 1437 H / 2016 M
3. Menandatangani perjanjian dengan 78 negara, baik negara dengan penduduk mayoritas maupun minoritas Islam terkait pelaksanaan ibadah Haji bagi jemaah Haji dari negara-negara tersebut.
4. Meluncurkan e-path bagi para jemaah Haji untuk melindungi hak-haknya, serta memfasilitasi dan mempercepat mekanisme untuk mendapatkan visa Haji secara elektronik.

Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah juga melakukan program sosialisasi intensif diberbagai media dan jejaring sosial mengenai tata cara pendaftaran dan regulasi mendapatkan izin Haji. Kementerian juga terus menyosialisasikan untuk mendaftar Haji melalui jalur resmi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. (CNN Indonesia, 2019)

Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan kebijakan visa elektronik (visa-el) bagi jemaah Umrah, setidaknya sejak sebelum Ramadhan tahun 2019. Adanya visa-el ini dinilai bisa memudahkan para calon jemaah Umrah untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Sebab, fasilitas ini memudahkan mereka untuk melengkapi dokumen perjalanan dalam waktu relatif singkat.

Selama ini, proses pengeluaran visa Umrah dilakukan melalui *provider* visa di Indonesia yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan muasasah. Prosesnya melalui Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Indonesia.

Sebelum kebijakan ini, jemaah yang hendak Umrah harus melengkapi data dan rekam sidik jari untuk visa di kantor VFS Tasheel yang tersebar disejumlah daerah di Tanah Air. Hal itu dinilai cukup menyulitkan masyarakat yang hendak melaksanakan Umrah. Sebab, mereka yang berasal dari daerah pedalaman harus bersusah-payah mendatangi kota tempat kantor VFS Tasheel berada.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengeluarkan sebanyak 7,65 juta visa Umrah sepanjang Oktober 2018 hingga 13 Juni 2019. Kementerian Haji dan Umrah Saudi menyebut, dari 7,39 juta jemaah Umrah itu, sebanyak 6,88 juta diantaranya telah kembali ke negaranya masing-masing.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 504.809 jemaah masih berada di Arab Saudi. Sebanyak 278.368 jemaah berada di Mekkah dan 226.441

diantaranya berada di Madinah. Sebanyak 6.550.520 jemaah datang melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah serta Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Sedangkan, 707.955 jemaah datang menggunakan jalur darat. Sisanya, 135.182 jemaah datang menggunakan jalur laut.

Kementerian Haji dan Umrah menyatakan, jemaah Umrah terbesar berasal dari Pakistan dengan total 1.657.777 orang. Kemudian, disusul Indonesia 967.125 jemaah, dan India dengan 650.480 jemaah. Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan, setidaknya terdapat 10.945 orang yang bekerja melayani ibadah di Baitullah tersebut. Jumlah tersebut terdiri atas 9.065 laki-laki dan 1.880 perempuan.

Pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan baru tentang penggunaan istilah 'wisata religi' (siyaahah ad-diiniyyah) dilarang untuk penyelenggaraan Haji dan Umrah. Istilah ini biasanya dikonotasikan dengan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki sejarah dalam dakwah Islam. Wisata ini adakalanya berada di domestik wilayah Saudi, ada juga yang sampai negara-negara Timur Tengah lainnya yang disatukan dalam paket perjalanan ibadah Umrah dan Haji khusus.

Kemenag dalam keterangan tertulis menyatakan Indonesia menjadi negara pengirim jemaah Haji di kawasan Asia yang pertama diundang Kerajaan Saudi Arabia untuk menandatangani MoU penyelenggaraan ibadah Haji 2019. Disepakati bahwa kuota jemaah Haji Indonesia 1440 H/2019 M sebanyak 221 ribu atau sama dengan tahun 2018. Setelah

penandatanganan MoU, pemerintah Indonesia mengusulkan kebijakan *fast track* (jalur cepat) yang tahun 2018 telah diterapkan 70 ribu jemaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Pada musim Haji 1440 H/2019 M juga diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia. Kebijakan ini akan memudahkan jemaah Haji karena mereka tidak perlu mengantri lama untuk proses imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah.

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penerbitan visa Haji dan Umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik, Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan ini tidak diterapkan.

Selain berbagai fasilitas yang terus diperbaiki, jemaah Haji Indonesia tahun ini mendapat fasilitas khusus dari Pemerintah Arab Saudi. Hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi membuat sejumlah fasilitas khusus jemaah Haji Indonesia. Fasilitas khusus yang diterima jemaah Haji Indonesia yaitu dibukanya sejumlah gerbang Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandar Udara Internasional Prince Mohammad bin Abdul Aziz di Arab Saudi. Sehingga, Indonesia mendapatkan *gate* di bandara paling banyak daripada negara lain.

Sebelumnya, jemaah Haji Indonesia sempat mengalami masalah karena keterbatasan bandara, terutama masalah keimigrasian di bandara. Tapi, di tahun ini jemaah Haji dari embarkasi Jakarta dan Surabaya, akan

mendapatkan perekaman biometrik di Tanah Air, dan mendapatkan pelayanan verifikasi imigrasi dari Arab Saudi.

Fasilitas khusus lainnya yang diberikan pemerintah Arab Saudi yaitu dengan diizinkan pendirian balai-balai kesehatan di Arafah, Mina, dan Madinah. Balai-balai itu sebetulnya dilarang berdiri di Arab Saudi. Sebab, Arab Saudi telah menanggung semua fasilitas kesehatan para jemaah.

Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru terkait biaya pengajuan visa ke negaranya sebagai bagian dari mewujudkan visi Arab 2030, yakni kebijakan direstrukturisasi menjadi satu harga yakni 300 riyal untuk semua jenis visa, termasuk Umrah. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan Raja Salman tertanggal 5 Muharram 1441 H (5 September 2019) sebagai tindak lanjut dari keputusan Dewan Kementerian tertanggal 4 Muharram 1441 H (4 September 2019). (Widi, 2019)

#### **A.2. Asumsi Dasar Kerja Sama Bilateral Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Menguntungkan Bagi Arab Saudi**

Harga minyak yang turun dari US\$ 90/barel atau Rp 1,2 juta di tahun 2010 menjadi US\$ 40-US\$ 50/barel atau Rp 534.000-Rp 667.000 akhir-akhir ini berpengaruh besar pada Arab Saudi, negara yang menggantungkan 50% pemasukannya dari sumber daya alam ini.

Pada tahun 2011, ekonomi Saudi tumbuh sebesar 9,96%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 3,49% dan setahun kemudian menjadi 1%. Peran industri yang sebagian besar sektor minyak adalah 58,8%

di tahun 2010, dan menuju menjadi 45,9% di tahun 2015 hingga di bawah 45% pada tahun 2016. Keadaan ini membuat Arab Saudi melakukan diversifikasi ekonomi ke bidang lain termasuk jasa, selain berencana menjual saham perusahaan minyaknya, Aramco ke pasar dunia.

Arab Saudi berusaha mengurangi ketergantungan pemasukan dari penjualan minyak mentah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Kerajaan Petro Dollar itu berusaha kembali menggairahkan bisnis yang pernah jadi tumpuan mereka pada era sebelum 1930-an, yakni sektor jasa ibadah Haji dan Umrah. Momen ziarah jutaan muslim sedunia itu mendatangkan banyak uang. Konsentrasi massa terbesar tentu saja di kota suci Mekkah, yang sesuai rukun Islam wajib didatangi setiap muslim yang sehat dan punya kemampuan finansial, setidaknya sekali seumur hidup.

Sektor jasa, termasuk Haji dan Umrah menyumbangkan pemasukan sebesar 39% di tahun 2010 bagi Arab Saudi dan naik 51% di tahun 2015, dengan Indonesia mengirim 300.000-400.000 jemaah Haji atau Umrah setiap tahun.

Pada puncak ibadah Haji yang berlangsung lima hari, lebih dari dua juta muslim dari seluruh dunia akan tumpah ruah di kota Mekkah. Sedangkan di bulan-bulan lainnya, jutaan orang tetap datang melaksanakan Umrah.

Kerajaan Arab Saudi belum lama ini mengumumkan rencana pembangunan jangka panjang hingga tahun 2030. Dalam dokumen tersebut, disebut dengan jelas betapa pembangunan infrastruktur penunjang Mekkah dan Madinah, kota suci terpenting dalam ajaran Islam akan terus ditambah.

Proyek ini mencakup tambahan moda transportasi, bangunan pencakar langit baru, serta pembukaan toko ritel merek-merek premium yang semakin mewarnai Mekkah. Ambisi Saudi membuat sebagian penduduk asli Mekkah merasa tidak nyaman. Sebagian menjadi korban penggusuran, sebagian lagi khawatir bisnis mereka akan tamat karena ekspansi investor asing di lokasi sekitar Kakbah.

Namun diluar konflik tersebut, Saudi sepenuhnya siap memanfaatkan wisata religi sebagai tambang uang baru untuk menggantikan minyak yang belum terlihat akan bangkit harganya dalam waktu dekat. Kerajaan ini ingin jumlah jemaah Haji dan Umrah meningkat dua kali lipat dalam satu dekade mendatang.

Arab Saudi menghabiskan miliaran dolar pendapatan minyaknya untuk memastikan keamanan dan keselamatan jemaah Haji, khususnya di Mina dimana terjadi sejumlah insiden yang menelan korban jiwa. Jutaan muslim dari seluruh dunia mendatangi Arab Saudi setiap tahunnya. Di luar Haji, kota suci Mekkah dan Madinah juga menyambut tamu Allah yang ingin melaksanakan Umrah. Gelombang manusia ini tentunya menjadi peluang pemasukan besar bagi Saudi. Sebuah perhitungan menyebut, Saudi meraup pendapatan hingga 200 miliar riyal atau Rp 704,5 triliun dari aktivitas Umrah hingga tahun 2020.

Pengembangan jasa Haji dan Umrah yang tercantum dalam program Visi Arab Saudi 2030 akan memberikan kesempatan kerja kepada lebih dari 30 ribu pria dan wanita Arab diberbagai sektor, termasuk akomodasi dan

transportasi. Saat ini terdapat sekitar 500 perusahaan Umrah, pembentukan perusahaan ini untuk mempromosikan layanan yang disediakan oleh perusahaan Haji dan Umrah. Perusahaan-perusahaan pemasaran harus mempromosikan program hiburan dan wisata, serta kunjungan ke situs bersejarah di Mekkah dan Madinah. (Elvina, CNN Indonesia, 2019)

## **B. Implementasi Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Kerja Sama Haji Dan Umrah Untuk Mewujudkan Visi Arab 2030 Di Indonesia Periode 2014-2019**

### **B.1. Penerapan Kebijakan Visi Arab 2030 Oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Pemerintah Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Sangat penting ketika Arab Saudi berusaha mewujudkan visinya. Karena ada krisis minyak, Saudi berusaha untuk mengembangkan pendapatan di luar migas. Salah satu pendapatan yang paling potensial adalah sektor jasa Haji dan Umrah.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerja sama ekonomi digital khususnya yang berkaitan dengan layanan Umrah. Kolaborasi dengan Arab Saudi antara lain mencakup inisiasi pengembangan *Umrah Digital Experience*, yang diyakini mampu menjadi solusi bersama memecahkan masalah utama di seluruh rantai Umrah. Dua *unicorn* Indonesia, Tokopedia dan Traveloka akan mengambil bagian dalam kolaborasi ini sebagai perwakilan industri Indonesia untuk mendukung visi Arab Saudi 2030 dan juga visi Indonesia yang merupakan ekonomi digital terbesar di ASEAN. Hal-hal yang juga dilakukan adalah pemberdayaan UKM dan ekosistem pendukungnya dalam bentuk pertukaran ahli serta pelatihan.

Arab Saudi kedepan ingin menjadikan Umrah dan Haji sebagai salah satu potensi pendapatan negara sehingga kalau selama ini visa gratis, maka kedepan tidak lagi. Karena Umrah merupakan *captive market* potensial, baik untuk Arab Saudi maupun Indonesia.

Himpunan penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) menilai perlu ada penyesuaian regulasi ibadah Umrah di Indonesia. Hal itu merespons kebijakan penerbitan visa elektronik (visa-el) bagi para jemaah Umrah yang hendak menuju Arab Saudi.

Penerapan kebijakan visa-el lebih memiliki kemudahan. Kendati, Saudi tetap ingin melindungi data jemaah yang berkunjung ke negara itu. Penerbitan visa-el tidak berhubungan dengan *big data*. Penerbitan visa-el ibadah Umrah serupa dengan penerbitan visa perjalanan ke negara-negara lain.

Kebijakan itu memungkinkan seorang calon jemaah Umrah Indonesia bisa mengurus visa dari luar negeri. Karena secara fisik, visa itu tidak harus masuk ke kedutaan (KBSA). Calon jemaah Umrah *apply* atau mengajukan lewat *provider* siapa pun yang punya kontrak visa, masukan datanya, dan *print* (cetak), seperti ke negara-negara lain. Pengajuan visa tidak lagi melalui perwakilan di masing-masing negara. Langkah Arab Saudi memangkas sistem birokrasi itu guna mewujudkan visi 2030, yakni menarik 30 juta jemaah Umrah ke negara tersebut. (Hasanul, 2019)

## **B.2. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah**

Pelaksanaan ibadah Haji tahun 2018 sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan baru yang dikeluarkan Kementerian Agama

terkait penyelenggaraan haji, yakni calon jemaah meninggal sebelum keberangkatan bisa diganti oleh keluarganya. Peraturan baru itu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor 148 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1439 H tahun 2018 M.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019. Penandatanganan MoU bertempat di kantor Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Mekah Al-Mukarramah.

Kemenag dalam keterangan tertulis menyatakan Indonesia menjadi negara pengirim jemaah Haji di kawasan Asia yang pertama diundang Kerajaan Saudi Arabia untuk menandatangani MoU ini. Disepakati bahwa kuota jemaah haji Indonesia 1440 H tahun 2019 M sebanyak 221.000 atau sama dengan tahun 2018.

Seusai penandatanganan MoU, Lukman mengatakan kesempatan bertemu dengan Menteri Haji Saudi digunakannya untuk menyampaikan sejumlah usulan peningkatan layanan terhadap jemaah haji Indonesia. Kebijakan fast track (jalur cepat) yang tahun lalu telah diterapkan pada 70 ribu jemaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada kebijakan ini akan memudahkan jemaah Haji karena mereka tidak perlu mengantre lama untuk proses imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah.

Kebijakan Arab Saudi dalam inovasi lain yakni terkait penerbitan visa Haji dan Umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Namun pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Agama meminta agar kebijakan ini tidak diterapkan agar tidak membebani calon jemaah haji mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 17 ribu pulau. Usulan lain yang diajukan pemerintah Indonesia terkait penomoran tenda di Arafah dan Mina sesuai dengan nomor kloter jemaah untuk memastikan jemaah Haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai kloter dan itu diharapkan memudahkan mobilisasi.

Sementara dalam kebijakan Umrah pemerintah Indonesia melakukan inovasi yakni Umrah digital namun hal ini masih bersifat pilihan. Umrah digital itu melibatkan *unicorn* tokopedia dan traveloka yang dituangkan dalam nota kesepahaman pemerintah Saudi. Namun umrah digital ini belum memiliki payung hukum yang mengatur, berbeda dengan Umrah konvensional yang memiliki dasar hukum sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Terdapat lima tujuan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini. Pertama, semakin meningkatkan jumlah warga negara yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang aman, nyaman, tertib dan sesuai ketentuan syariat Islam. Kedua, peningkatan pelayanan pemondokan, transportasi, konsumsi kerap menimbulkan masalah setiap tahunnya yang belum dapat diatasi secara optimal. Ketiga, mengatasi daftar tunggu jemaah Haji yang sangat panjang. Keempat, mengatasi

lemahnya koordinasi antara petugas penyelenggara di Arab Saudi. Kelima, melengkapi pengaturan secara komprehensif proses penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah agar tidak ada lagi jemaah yang terlantar dan gagal berangkat untuk menunaikan Umrah karena kesalahan teknis dan manajemen penyelenggara ibadah Umrah.

➤ Inovasi pada penyelenggaraan ibadah Haji 2019:

- Pertama, penerapan *fast track* (jalur cepat) pada seluruh bandara pemberangkatan dan semua embarkasi.
- Kedua, penempatan jemaah Haji (akomodasi) berdasarkan sistem zonasi.
- Ketiga, penggunaan *air conditioner* (ac) di Arafah.
- Keempat, intensifkan sistem laporan Haji terpadu, pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan. Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyiapkan sistem pelaporan petugas digital.
- Kelima, penguatan manasik Haji (panduan haji) menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian penyelenggaraan Haji 2019
- Keenam, peningkatan porsi sistem sewa hotel di Madinah dari *blocking time* menjadi *full* musim.
- Ketujuh, terkait dengan Armuzna. yakni dibutuhkan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan kedepan tenda harus ada nomor di Arafah dan Mina, sehingga tidak ada lagi saling klaim dan revitalisasi satuan tugas operasional Armuzna.
- Kedelapan, strukturisasi kantor daerah kerja (daker)

- Kesembilan, sinkronisasi regu/rombongan dengan transportasi udara
- Kesepuluh, kloter berbasis embarkasi
- Kesebelas, katering citarasa daerah
- Keduabelas, manajemen krisis. (Nurmayanti, 2019)

Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah terkait Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka Revitalisasi Asrama Haji dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama pun turut membuka peluang kerja sama yang lebih luas bagi pelaku usaha di bidang usaha Haji dan Umrah.

Sebagai informasi, total jemaah Haji di Tanah Suci pada Tahun 2018 mencapai 2.371.675 jiwa, dengan 612.964 (25,85%) jemaah berasal dari Arab Saudi dan 1.758.711 (74,15%) diantaranya berasal dari luar Arab Saudi.

Pemerintah juga tengah membangun layanan digital dalam rangka mengantisipasi permasalahan pada penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Dengan demikian, konsumen dapat memilih PPIU/Travel yang terpercaya dan memiliki *rating* penilaian baik dari masyarakat. Selain itu, Kementerian Agama juga telah membuat aplikasi khusus sebagai referensi pencarian biro travel Umrah yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. (Suryadi, 2019)

### **B.3. Efektifitas Kebijakan Visi Arab 2030 Oleh Pemerintah Arab Saudi Terhadap Pemerintah Indonesia**

Perubahan demi perubahan dilakukan oleh Raja Salman yang didukung oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Visi 2030 menjadi kunci dari reformasi yang dilakukan oleh kerajaan yang dikenal konservatif itu. Kesan konservatif inilah yang ingin dihilangkan oleh Arab Saudi. Visi 2030 ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak, sekaligus melakukan diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi dan wisata.

Rencana yang bagus tidak akan terwujud dengan baik jika eksekusinya buruk. Setidaknya hal inilah yang harus diperhatikan Arab Saudi. Raja Salman dan Pangeran Mohammad bin Salman, harus mewujudkan rancangan di atas kertas menjadi kenyataan. Meskipun pada akhirnya rancangan visi 2030 itu sangat sempurna, tidak hanya kemampuan SDM yang diperlukan tetapi juga investasi asing.

Kemudian, korupsi juga harus menjadi fokus. Meskipun saat ini Pangeran Mohammad bin Salman sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa pangeran atas tuduhan korupsi, penegakan hukum terutama pelaku korupsi menjadi hal krusial dalam mewujudkan visi 2030. Konsistensi dan eksekusi menjadi kunci dalam visi 2030. Para pengamat, khususnya dari Arab Saudi menyuarakan optimisme mereka bahwa visi ini akan berhasil. Tetapi terlepas dari semua rencananya, dunia akan menjadi saksi perubahan Arab Saudi dari negara ultrakonservatif menjadi negara moderat yang selama ini

diutarakan oleh Pangeran Mohammad bin Salman dalam setiap kunjungannya ke luar negeri.

Visi Arab 2030 dinilai efektif diterapkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki jemaah Haji terbanyak di dunia. Selama ini, hubungan dengan Saudi itu pun lebih banyak hubungan keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, sesuai dengan visi pemerintah Arab Saudi 2030, yang isinya antara lain ingin meningkatkan investasi diluar minyak dan gas. Pemerintah Indonesia telah siap memberikan penawaran-penawaran menarik yang dapat dijajaki Saudi untuk menanamkan modalnya, antara lain dibidang perbankan dan pariwisata.

Kerja sama ekonomi lainnya yang dibahas, antara lain pembangunan kilang minyak di Cilacap yang merupakan hasil kerja sama Pertamina dan *Saudi Arabian Oil Company* dengan nilai investasi mencapai 6 miliar dolar AS. Sepanjang 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Arab Saudi sebesar 900.000 dolar AS untuk 44 proyek di Indonesia.

Nilai investasi tersebut menempatkan Arab Saudi di urutan ke-57, di bawah Afrika Selatan yang menanamkan modalnya sebesar 1 juta dolar AS dan Mali yang mampu menginvestasikan 1,1 juta dolar AS di Tanah Air.

## **C. Manfaat Dan Dampak Ekonomi Kerja Sama Haji Dan Umrah Bagi Indonesia Dan Arab Saudi**

### **C.1. Prospek Kerja Sama Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah**

Selama empat tahun terakhir, hubungan dua negara terus menguat sejak kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada 2017 dan kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada 2019. Berbagai jenis kolaborasi dan perjanjian kerja sama pun terus dilakukan. Kedua negara sepakat membentuk poros baru yang dikenal dengan Saunesia dan aktif mengambil bagian dalam kolaborasi ekonomi, keamanan, budaya dan Haji.

Detail awal disuguhkan oleh Pangeran Mohammad bin Salman pada 25 April 2016. Dewan Menteri menugaskan Dewan Urusan Ekonomi dan Perkembangan untuk melakukan identifikasi serta memonitor mekanisme implementasi krusial dari visi Arab 2030.

Minyak mentah penyumbang 30 hingga 40 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari Arab Saudi. Tetapi proporsi ekonominya juga tergantung pada distribusi minyak. Mencoba mengurangi ketergantungan akan minyak sudah menjadi tujuan utama dari pemerintah sejak era 1970. Tetapi, implementasinya sangat tidak stabil dan lagi-lagi tergantung pada harga minyak dunia.

Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah bisa menjadi pengikat hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi dan berbagai pihak di dalamnya. Salah satunya mengenai perdagangan. Hubungan perdagangan Indonesia menjadi semakin membaik, juga disektor ekspor non migas semakin

meningkat. Kedatangan jemaah Indonesia ke Saudi merupakan *captive market*, karena semua barang asal Indonesia pasti laku di Arab Saudi, terutama makanan.

Berdasarkan Data Statistik Perdagangan KJRI Jeddah, total volume dagang Indonesia dan Arab Saudi periode Januari-Juni 2018 mencapai 2.687 miliar dolar AS atau naik 23,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yang mencapai 2.177 miliar dolar AS. Total perdagangan migas periode Januari-Juli 2018 senilai 1.517 miliar dolar AS naik 41,19 persen, dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 dengan nilai 1.074 miliar dolar AS. Total perdagangan non migas sampai dengan Juni 2018 mengalami kenaikan mencapai sebesar 6,07 persen dari 1.103 dolar AS pada Juni 2017 menjadi 1.170 miliar dolar AS pada periode yang sama di tahun 2018.

Setiap tahunnya ada 1,3 juta jemaah Umrah datang. Belum lagi jemaah Haji yang mencapai 221.000 orang dari Indonesia. Semuanya akan lebih baik bila difasilitasi dan dilayani dengan produk dalam negeri. Sebagai contoh hotel tempat jemaah menginap bisa diwajibkan untuk menggunakan semua produk buatan Indonesia. Haji dan Umrah harus dimanfaatkan untuk peningkatan devisa negara dan menguatkan kepentingan nasional. Pengusaha asal Indonesia harus menjalin komunikasi dengan para saudagar Saudi agar ekspor produk Indonesia terus meningkat, terutama menjelang musim Haji.

Sewaktu berkunjung ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Umrah bersama keluarga, pada Ahad hingga Senin, 14-15 April 2019, Presiden Joko

Widodo berhasil menyepakati penambahan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000 orang.

Dalam kunjungan ini, Presiden juga bertemu langsung (*face to face*) dengan Raja Salman, sebagai tamu kehormatan di istana pribadi raja, Al-Qasr Al-Khas, Riyadh, pada Ahad sore, 14 April 2019. Kedua kepala negara pun sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, khususnya di bidang energi dan pariwisata.

Konektivitas antara Indonesia dan Arab Saudi juga sangat erat. Hal ini terlihat dari aktivitas Presiden Jokowi dan keluarganya yang mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam bangunan Ka'bah. Beliau juga menunaikan shalat sunnah dua rokaat di dalamnya. Peristiwa ini terjadi pada Senin 15 april 2019 dini hari. Lalu saat adzan Shubuh berkumandang, Presiden bersama Ibu Negara, Hj Iriana, serta kedua anaknya, Kaeseng Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, bersama-sama keluar dari dalam pintu Ka'bah. Keempatnya lalu beribadah shalat Shubuh berjemaah, melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah, mencium hajar aswad, berlari-lari kecil dari shafa ke marwah dalam ibadah sa'i dan berakhir dengan tahalul atau mencukur rambut. Ibadah Umrah ini berakhir sekitar pukul 06:37 waktu Mekkah.

Lalu dihari yang sama, pukul 09:05 waktu Jeddah, Presiden dan keluarganya bersama-sama berangkat dari Bandar Udara King Abdul Aziz, Jeddah, menuju ke Bandara Prince Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah. Rombongan presiden tiba pukul 09:50 waktu Madinah. Lalu sekitar pukul

10:35 waktu setempat, Presiden Joko Widodo bersama keluarga beribadah di Masjid Nabawi, Madinah.

Presiden juga menunaikan shalat sunnah dua rakaat di Raudhah. Presiden Jokowi dan keluarganya juga mendapatkan hak istimewa untuk berziarah dan masuk ke dalam makam Rasulullah Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, dan Khalifah Umar bin Khattab di dalam Masjid Nabawi.

Fenomena kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi menunjukkan bahwa agama Islam menjadi pertimbangan utama dan faktor paling penting dalam konektivitas antara Indonesia dan Arab Saudi. Apalagi Indonesia memiliki daya tawar yang sangat tinggi terhadap Arab Saudi. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. (Ibrahim, 2019)

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat bahwa 207.176.162 jiwa penduduk Indonesia beragama Islam. Angka ini mencapai 87,18 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2010.

Konsekuensi logisnya, Indonesia memiliki kuota Haji terbesar di dunia dengan jumlah 221.000 jamaah pada tahun 2017 dan 2018. Kuota haji ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai negara pemegang otoritas Masjidil Haram di Mekah al Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah al Munawwarah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI di Amman, Yordania, pada tahun 1987. Kuota haji di

Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2018 bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Kuota Haji tahun 2010 dan 2011 sebanyak 221.000 jemaah Haji setiap tahunnya. Berbeda dengan tahun 2012 dan 2013 sebanyak 211.000 jemaah Haji setiap tahunnya. Di tahun 2014, 2015, dan 2016 kuota jemaah Haji Indonesia sebanyak 168.800 setiap tahunnya.

OKI sepakat bahwa dari 1.000 orang penduduk Muslim di suatu negara, hanya 1 orang yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah di kota suci Mekkah dan Madinah menjadi faktor penting dalam konektivitas kedua negara.

Di sisi lain, jumlah ekspatriat Indonesia (Warga Negara Indonesia/WNI) yang terdaftar di wilayah kerja KBRI Riyadh, hingga 17 Agustus 2018, mencapai 260.000 orang. Sedangkan jumlah ekspatriat Indonesia yang terdaftar di wilayah kerja KJRI Jeddah mencapai sedikitnya 300 ribu orang. Jadi terdapat sedikitnya 560 ribu ekspatriat Indonesia di Arab Saudi.

Bahkan menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, terdapat lebih dari 600 ribu ekspatriat Indonesia di Arab Saudi. Retno menyatakan hal itu pada Selasa, 23 Oktober 2018, saat bertemu Menlu Kerajaan Arab Saudi, Adel al-Jubeir, di Jakarta. Dengan kata lain, para ekspatriat serta jemaah Haji dan Umrah asal Indonesia berhasil menjadi ujung tombak dalam promosi produk-produk halal nasional di Arab Saudi.

Fakta di atas terbukti dari besarnya kuantitas impor buah-buahan, sayur-mayur, produk makanan olahan, dan aneka ragam kuliner Indonesia oleh Maula al Dawilah Trading & Co selama tahun 2018. Perusahaan importir swasta asal Arab Saudi ini tercatat melakukan transaksi impor senilai US\$ 5,35 juta atau sekitar Rp 77 miliar dari Indonesia.

Maula Al Dawilah Trading & Co juga mengimpor buah-buahan dari Indonesia secara rutin, sejumlah 3-5 ton setiap pekan atau sebanyak 130-170 ton per tahun pada 2018. Buah-buahan itu dikirim melalui kargo udara selama dua hari ke Jeddah, Arab Saudi. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)-Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Gunawan, pada 16 Januari 2019. Tepatnya dalam pertemuan bisnis di pergudangan Maula Al Dawilah Trading & Co, Jeddah, Arab Saudi.

Adapun sayur-mayur yang diimpor Arab Saudi dari Indonesia meliputi cabai, bawang putih, bawang merah, petai, jengkol, kemiri, daun kelapa, buah kelapa, dan tanaman apotek hidup, serta rempah-rempah seperti lengkuas, jahe, kayu manis, dan kemiri. Sedangkan buah-buahan yang diimpor meliputi buah naga, rambutan, durian, belimbing, manggis, salak, pisang, sirsak, nangka, pepaya, dan mangga.

Aneka produk kuliner dan makanan olahan pun diimpor oleh Arab Saudi dari Indonesia seperti kacang-kacangan, produk olahan kacang, kerupuk, biskuit, aneka kopi sachet (seperti good day), minuman sereal

(seperti energen), gula merah, mie dan bihun, tepung beras, tepung jagung, kecap sedap, santan cair kara, buah-buahan kaleng, tuna, dan kedelai.

Lebih lanjut, sejumlah restoran milik ekspatriat Indonesia juga menjadi primadona di Arab Saudi. Misalnya Restoran Garuda dan Warung Bakso Mang Oudin di Balad, Jeddah, Rumah Makan Indonesia di dekat Masjid Nabawi, Madinah, Mr. Sate dan Restoran Batavia di distrik Ash-Sharafiyyah, Jeddah, Restoran Pasundan di distrik al-Baghdadiyah as-Sharqiyah, Jeddah, dan Restoran Putri Sriwijaya di distrik al-Ruwais, Madinah. Ada pula Restoran Wong Kito ‘Sumatera’ di Rumah Sakit Wiladah wal Atfal, Mekah.

Pemasaran produk-produk kuliner halal Indonesia di Arab Saudi akan semakin meningkat dengan penggunaan teknologi informasi berbasis aplikasi dan internet. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi bangsa Indonesia di era industri 4.0. Khususnya dalam hal koordinasi antar institusi pemerintah, swasta, dan ekspatriat Indonesia di Arab Saudi. (Ibrahim, 2019)

## **C.2. Indikator Keberhasilan Kerja Sama Bilateral Haji dan Umrah Bagi Indonesia dan Arab Saudi**

Kementerian Agama terus berkomitmen dalam perbaikan penyelenggaraan ibadah Haji. Selain usaha pemerintah untuk meminta penambahan kuota. Kali ini kualitas manasik Haji menjadi perhatian sebagai salah satu indikator keberhasilan. Bersama Badan Litbang dan Diklat, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) melakukan penelitian terhadap proses manasik Haji yang selama ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Indikator keberhasilan penyelenggaraan ibadah Haji dilihat dari indeks kepuasan jemaah Haji. Tahun 2017 indeks kepuasan mencapai 84,85% atau memuaskan. Tahun 2018 indeks kepuasan menembus 85% atau sangat memuaskan. Dari pengamatan di lapangan dan analisa data yang dilakukan Dirjen Haji dan Umrah ketidakpuasan terjadi dalam hal penyediaan menu makanan yang tidak sesuai dengan selera jemaah, yang menyebabkan jemaah Haji tidak makan sehingga banyak yang sakit. Oleh karena itu, dilakukanlah inovasi menu makanan dengan cita rasa Indonesia untuk menunjang proses beribadah di tanah suci, sehingga bisa mendongkrak indeks kepuasan hingga menembus 85%.

Haji dan Umrah untuk tahun 2019, selain menetapkan inovasi menu makanan ke arah cita rasa kedaerahan seluruh nusantara, Direktorat Jenderal Haji telah menetapkan 8 inovasi untuk perbaikan penyelenggaraan, yakni:

1. Sistem zona untuk mengurangi jemaah Haji yang tersesat
2. Proses verifikasi yang dulu dilakukan di Arab Saudi sekarang dilakukan di Indonesia
3. Formasi tempat duduk pesawat dan tempat tinggal di Mekkah dikelompokkan sesuai keinginan jemaah dalam upaya menciptakan kenyamanan jemaah
4. Penerapan sistem *fast track* atau jalur cepat imigrasi di 13 embarkasi
5. Revitalisasi satuan tugas operasional di Arafah, Muzdalifah dan Mina
6. Sistem laporan Haji terpadu, dan seterusnya. (Indriyani, 2019)

### **C.3. Manfaat Dan Dampak Ekonomi Bagi Indonesia Dan Arab Saudi**

Selama ini Arab Saudi bukan merupakan destinasi wisata yang menjadi pilihan para turis. Akan tetapi, pemerintah Arab Saudi bakal mengubah itu. Setiap tahun, Arab Saudi sudah menyambut jutaan jemaah Haji. Kini, pemerintah Arab Saudi akan menyambut turis konvensional untuk menggenjot devisa dan perekonomian. Targetnya adalah orang-orang yang ingin merasakan negara ini dan kemegahan negara ini.

Pemerintah Arab Saudi ingin mengembangkan Haji dan Umrah sebagai salah satu sumber pendapatan negara seiring krisis berkepanjangan harga minyak dunia. Lawatan Raja Salman dan rombongan berjumlah 1500 orang ke Indonesia pada tahun 2017 akan menyentuh sejumlah bidang seperti jasa Haji dan Umrah, selain minyak. Sektor jasa, termasuk jasa Haji dan Umrah menyumbangkan pemasukan sebesar 39% di tahun 2010 bagi Arab Saudi dan naik 51% di tahun 2015, dengan Indonesia mengirim 300.000-400.000 jemaah Haji atau Umrah setiap tahun. Sementara bagi Indonesia, selain memperoleh nilai religius saat beribadah, Arab Saudi juga dapat menjadi pasar bagi produk makanan dan pakaian hasil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta berbagai produk hasil kerajinan tangan khas Indonesia, karena di Arab Saudi itu terdapat sangat banyak pasar muslim baik yang menjual makanan, pakaian, dan sebagainya. Dengan adanya kerja sama Haji dan Umrah ini Indonesia juga berpotensi mendapatkan posisi tawar yang sangat kuat untuk meminta izin agar bisa memiliki *dormitory* (asrama Haji dan Umrah)

Pada tahun 2030 mendatang, jumlah kedatangan turis ditargetkan mencapai 30 juta, naik dari 18 juta pada tahun 2016 . Sesuai dengan visi Arab 2030, yang diterbitkan oleh Putra Mahkota Salman pada tahun 2016, menggaris bawahi bahwa pasar wisata Islami memiliki peran signifikan dalam mendiversifikasi ekonomi non minyak di Arab Saudi. Strategi tersebut difokuskan terutama pada Umrah, investasi US\$ 50 miliar atau sekitar Rp 720 Triliun pada transportasi baru dan infrastruktur lain juga bertujuan menggandakan jumlah jemaah Haji pada akhir dekade mendatang.

Di tahun 2020 pemerintah Arab Saudi menargetkan belanja turis secara tahunan mencapai 47 miliar dollar AS. Untuk mencapai target-target ambisius tersebut, beberapa proyek dijalankan, seperti rencana pembangunan resor di pinggir pantai dan taman hiburan yang rencananya rampung pada tahun 2022. Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, juga mengumumkan rencana pembangunan metropolis senilai 500 miliar dollar AS yang membentang sepanjang perbatasan Arab Saudi dengan Mesir dan Yordania. Pangeran Mohammed memang mendorong perombakan total pada perekonomian Arab Saudi. Arab Saudi memiliki potensi wisata yang besar, karena iklimnya, warisan sejarah dan budayanya, keindahan alam, dan biota laut yang kaya. Namun, Arab Saudi dikelilingi negara yang politiknya tidak stabil dan keamanan selalu menjadi isu.

Penyelenggaraan Haji dan Umrah sangat berpotensi meningkatkan perdagangan Indonesia dan Arab Saudi. Oleh karena itu, setiap tahun KJRI menggelar pameran produk Indonesia di Arab Saudi untuk menunjang

penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pameran itu bertujuan mengenalkan produk pangan dari Indonesia dan terbukti membukukan transaksi yang cukup besar.

Ada potensi ekonomi dan perdagangan yang besar dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Pasca pameran telah terjadi kesepakatan dagang seperti komponen perlengkapan perhotelan, penajakan pengadaan bus produk Indonesia, dan produk pangan.

Keseriusan pemerintah Arab diwujudkan dengan menggelar kompetisi Hajj Hackathon bersama Google yang bertujuan untuk pengembangan aplikasi untuk memudahkan kegiatan ibadah Haji. Hackathon ini menjadi langkah konkret Arab Saudi untuk mewujudkan visi ibadah Haji dengan teknologi canggih pada tahun 2030.

Tahun ini, Hajj Hackathon bahkan dianugerahi penghargaan Guinness World Records dengan jumlah peserta terbanyak. Dalam kompetisi Hajj Hackathon, para peserta berfokus mengembangkan berbagai aplikasi yang berhubungan dengan ibadah Haji, seperti manajemen kerukunan, makanan, kesehatan, keuangan, kontrol lalu lintas, perjalanan, komunikasi, dan pengelolaan limbah.

Masuknya kerajaan Arab Saudi ke dalam Guinness World Records melalui Hajj Hackathon menegaskan aspirasi pemuda Saudi untuk negara mereka sebagai pintu gerbang teknologi di kawasan itu, sejalan dengan visi Kerajaan Arab Saudi 2030, sebagai visi yang ambisius yang membawa kerajaan menuju kemajuan disemua aspek kehidupan.

Di Indonesia yang mayoritas muslim, seyogyanya menyambut gembira bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi menambah kuota haji sebanyak 10 ribu orang. Ini adalah kabar gembira lantaran kuota Haji kita pernah dipotong 20 persen pada tahun 2014-2016 silam sebagai dampak perluasan proyek Masjidil Haram. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kuota Haji terbesar sekitar 221.000 jemaah.

Kuota Haji reguler tahun ini dalam pembahasan BPIH masih ditentukan sebesar 204 ribu calon jemaah Haji. Rinciannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440 H tahun 2019 M, diatur kuota Haji Indonesia berjumlah 221.000.

Jumlah ini terdiri atas 204.000 kuota Haji reguler dan 17.000 kuota Haji khusus. Kuota Haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu 202.487 jemaah Haji dan 1.513 untuk tim petugas Haji daerah.

Indonesia bersedia berkolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi dalam mewujudkan visi Arab 2030 negara itu, dalam bentuk MoU digital collaboration. Kolaborasi ini membawa manfaat untuk Indonesia dan Arab Saudi. Potensi anak muda Arab Saudi yang berpendidikan, serta penetrasi internet yang mencapai 76% dan penetrasi mobile mencapai 137%. Kerja sama dengan Indonesia melesatkan kemajuan digital di Arab Saudi. Alasan memilih berkolaborasi dengan Indonesia juga dilatarbelakangi keberhasilan pemerintah Indonesia yang dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun, mampu membangun ekosistem digital dan memanfaatkan pertumbuhan pasar domestik untuk

tumbuhnya 4 *unicorn*, yakni Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, dan Go-Jek. Manfaat jangka pendek dengan adanya kerja sama ini khususnya dalam pengembangan startup umrah adalah terciptanya transparansi tata kelola umrah yang dapat menguntungkan jemaah Indonesia yang besar jumlahnya. (Elvan Dany, 2019)

Selain manfaat religius dan penambahan kuota, ada banyak manfaat yang bisa Indonesia terima dari kerja sama Haji dan Umrah yakni mempererat kekerabatan dan keakraban sesama muslim dengan Arab Saudi dan menjalin hubungan perdagangan untuk meningkatkan perekonomian negara. Indonesia dapat bekerja sama dengan saudagar Arab dengan pemerintah Indonesia mengeksport berbagai produk asli Indonesia yang akan dijual di pasar muslim di Arab Saudi.

**a. Jumlah Devisa Yang Diterima Oleh Arab Saudi Dari Sektor Haji Dan Umrah**

Fakta yang perlu diperhatikan dalam pagelaran Haji dan Umrah adalah keduanya merupakan sumber pendapatan abadi bagi negara Arab Saudi. Tercatat tidak kurang dari 2 juta warga dunia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah tersebut. Kerajaan Arab Saudi diperkirakan memperoleh pendapatan sekitar 32 miliar Real Saudi (8,5 miliar dolar AS) dari penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2016. Pendapatan Arab Saudi akan selalu meningkat setiap tahun dan kemungkinan kecil untuk mengalami penurunan, dikarenakan fakta jumlah penduduk muslim diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Muslim yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, 30% di Asia Selatan

yakni Pakistan, India dan Bangladesh. Oleh karena pertumbuhan global yang selalu meningkat tak ayal bahwa jumlah penduduk muslim ini akan menjadi peluang pendapatan dari sektor Haji dan Umrah Arab Saudi setiap tahunnya.

Pada Januari 2016 lalu, Katie Sola dari *Forbes* mengutip perhitungan dari seorang ekonom yang mengungkap bahwa di tahun 2014 pendapatan Arab Saudi atas penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah mencapai \$18,6 miliar, dimana \$8,5 miliar khusus dari Haji, sedangkan sisanya atau sekitar \$10,1 miliar berasal dari Umrah. Jumlah gabungan itu mencapai 10 persen dari pendapatan minyak Arab Saudi, pada 2014 saja pendapatan Saudi dari gabungan Haji dan Umrah diperkirakan sebesar USD18,6 miliar yang USD8,5 miliar diantaranya berasal dari penyelenggaraan Haji saja.

Kemudian seperti yang dilansir oleh portal berita Era Muslim pada 12 Desember 2017 bahwa Kerajaan Arab Saudi diperkirakan memperoleh pendapatan sekitar 32 miliar Real Saudi atau sekitar 8,5 miliar dolar AS dari penyelenggaraan ibadah Haji bulan Oktober 2016.

Dengan jumlah jemaah Haji dan Umrah yang hingga kini telah mencapai sedikitnya 12 juta jemaah pertahun, pendapatan di sektor ini setara 10% dari pendapatan minyak negara tersebut serta memberi andil sekitar 3% dari total PDB Arab Saudi. Sekitar 40% pendapatan tersebut berasal dari sektor perumahan, disusul souvenir atau hadiah 15%, makanan 10%, dan sisanya dari layanan lain. Pendapatan Haji dan Umrah diperkirakan akan mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS pada tahun 2022. Ini terjadi setelah adanya penggabungan blok ekonomi dan pengelompokan yang diharapkan untuk memenuhi permintaan yang semakin

meningkat pada ekonomi Haji dan Umrah dalam hal transportasi, toko komersial, dan ekspansi dalam skala kecil, serta usaha menengah (UKM).

Pendapatan Haji akan memberi tambahan ekonomi nasional. Untuk itu rencana terpadu harus dikerjakan untuk mengendalikan pendapatan dan sumber daya keuangan dengan cara yang akan melayani Visi Saudi Arabia 2030. Arab Saudi selaku rumah akan 30 juta peziarah dan umrah pada tahun 2030. Bila dibuat kerangka ekonomi yang terorganisasi dengan baik akan menjadikan perubahan mekanisme ekonomi yang menarik yang diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahun.

Oleh karena itu, pusat penelitian khusus harus didirikan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji dan Umrah dan Kamar Dagang dan Industri Mekkah untuk menyediakan indeks ekonomi, dan memperbaiki angka-angka ekonomi untuk musim Haji dan Umrah dalam Rencana Transformasi Nasional (NTP) 2020.

Pendapatan yang berasal dari ekonomi Haji dan Umrah dalam lima tahun ke depan diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS. Dan dana sebesar ini harus diarahkan untuk menyusun kembali sektor ini dan mengatur ulang prioritasnya daripada memompa uang tersebut ke luar dari Kerajaan. Aspek ekonomi Haji dan Umrah tidak dapat diabaikan karena keduanya mampu memberikan margin keuntungan yang tinggi dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi sektor ini, yang akan membuka jalan bagi arus modal ke Mekah dan Madinah. Dan ini tidak hanya dalam urusan Haji dan Umrah saja tapi juga untuk sektor UKM, sektor perhotelan yang bisa meraup dua pertiga sektor di seluruh pendapatan Arab Saudi.

Pada tahun 2019, pemasukan Arab Saudi dari Haji mencapai Rp. 11,9 triliun dan akan meningkat menjadi Rp. 1.476 triliun pada tahun 2022. Begitupun dengan Umrah yang pada tahun 2017 mencapai 1,1 juta jemaah. Selama tiga bulan terakhir pada 2018 saja, sekitar 256 ribu jemaah Umrah Indonesia berangkat ke tanah suci. Sektor jasa, termasuk jasa Haji dan Umrah menyumbangkan pemasukan sebesar 39% di tahun 2010 bagi Arab Saudi dan naik 51% di tahun 2015, dengan Indonesia mengirim 300.000-400.000 jemaah Haji atau Umrah setiap tahun.

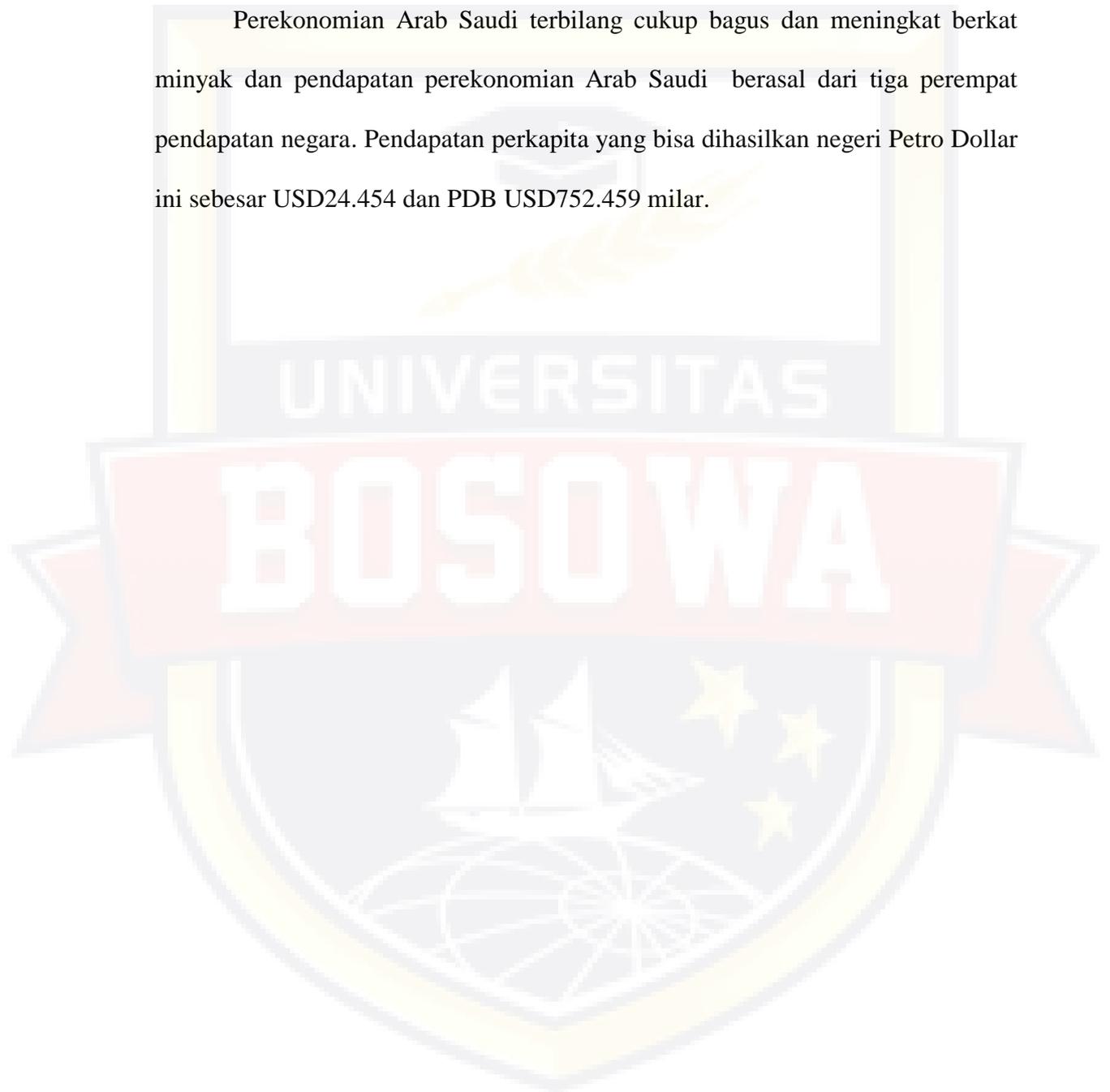
**b. Jumlah Devisa Yang Diterima Oleh Arab Saudi Dari Sektor Minyak**

Arab Saudi yang awalnya dikenal terkait 2 hal, yaitu padang pasir yang luas dan rumah bagi sejumlah situs suci Agama Islam, sontak berubah menjadi salah satu negara paling kaya di dunia dan memiliki kekuatan ekonomi paling signifikan. Yang memiliki posisi tawar terkait pasokan energi global. Menjadi negara petro dollar.

Penduduk Arab awalnya nomaden, mengandalkan pendapatan dari para jemaah yang beribadah ke Mekah dan Madinah. Setelah minyak ditemukan, negeri tersebut membangun infrastruktur yang kuat, terdiri atas sumur-sumur minyak, pipa, kilang, dan pelabuhan. Arab Saudi memiliki ladang minyak yang melatar belakangi ekonomi dengan pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah dari segala aktivitas perekonomian. Arab Saudi setidaknya memproses 18% kebutuhan petroleum dunia, mendapat gelar sebagai eksportir petroleum terbesar di dunia, dan memainkan peranan sebagai ketua OPEC untuk beberapa

tahun. Sektor petroleum juga merupakan penyumbang untuk pendapatan negara Saudi yang terbesar.

Perekonomian Arab Saudi terbilang cukup bagus dan meningkat berkat minyak dan pendapatan perekonomian Arab Saudi berasal dari tiga perempat pendapatan negara. Pendapatan perkapita yang bisa dihasilkan negeri Petro Dollar ini sebesar USD24.454 dan PDB USD752.459 miliar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia dan Arab Saudi melakukan hubungan bilateral dalam kerja sama diberbagai bidang. Salah satunya dibidang jasa penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. Indonesia memang merupakan mitra yang sangat baik bagi Arab Saudi, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki muslim terbanyak di dunia dan kekerabatan diantara kedua negara. Haji dan Umrah merupakan salah satu kepentingan nasional bangsa Indonesia dewasa ini, karenanya pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perbaikan dan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah guna memperbaiki pelayanan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh jemaah Haji dan Umrah dalam melakukan ibadah di Arab Saudi, sedangkan bagi Arab Saudi, Haji dan Umrah merupakan sumber pendapatan lain selain minyak, sumber pendapatan Arab Saudi dari Haji dan Umrah sangat besar. Dengan begitu, untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman Arab Saudi juga telah banyak melakukan perbaikan dan kebijakan. Arab Saudi yang dikenal memiliki 2 kota suci yakni Mekah dan Madinah memang merupakan negara tujuan umat Islam dari seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah Haji dan Umrah.

Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah untuk mewujudkan visi Arab 2030 di era Presiden Joko Widodo memang telah terealisasi di Indonesia. Salah satu kebijakan

pemerintah Arab Saudi dibawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Muhammad bin Salman sesuai visi Arab 2030 yakni dengan menambahkan kuota jemaah Haji Indonesia sebanyak 10.000 sehingga berjumlah total 221.000 jemaah. Penambahan kuota tersebut guna meningkatkan jemaah Haji dari Indonesia. Pemerintah Arab Saudi juga meningkatkan kapasitas jemaah Umrah, dari hanya sekitar 8 juta menjadi 30 juta orang per tahun di tahun 2030, meski untuk mewujudkan visi Arab 2030 masih dalam proses karena target pemerintah Arab Saudi hingga tahun 2030.

Perekonomian Arab Saudi terbilang cukup bagus dan meningkat berkat minyak. Pendapatan perkapita yang bisa dihasilkan negeri Petro Dollar ini sebesar USD24.454 dan PDB USD752.459 miliar. Selain minyak, devisa yang didapat dari orang-orang yang melaksanakan Haji dan Umrah juga turut menyumbang pendapatan negara.

Para ahli ekonomi Arab Saudi mengatakan bahwa pendapatan Haji dan Umrah diperkirakan akan mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS pada tahun 2022. Ini terjadi setelah adanya penggabungan blok ekonomi dan pengelompokan yang diharapkan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat pada ekonomi Haji dan Umrah dalam hal transportasi, toko komersial, dan ekspansi dalam skala kecil, serta usaha kecil menengah (UKM). Untuk itu rencana terpadu harus dikerjakan untuk mengendalikan pendapatan dan sumber daya keuangan dengan cara yang akan melayani Visi Saudi Arabia 2030. Rencana Arab Saudi selaku rumah akan 30 juta peziarah dan umrah pada tahun 2030. Kerangka ekonomi yang terorganisasi dengan baik akan menjadikan perubahan mekanisme ekonomi yang menarik yang

diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahun. Oleh karena itu, pusat penelitian khusus harus didirikan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji dan Umrah dan Kamar Dagang dan Industri Makkah untuk menyediakan indeks ekonomi, dan memperbaiki angka-angka ekonomi untuk musim Haji dan Umrah dalam Rencana Transformasi Nasional (NTP) 2020. Namun dalam penulisan ini penulis hanya membatasi penelitian hingga tahun 2019, meski beberapa ahli ekonomi menyebutkan perkiraan pendapatan yang diperoleh Arab Saudi dari sektor jasa Haji dan Umrah setelah tahun 2019 dan seterusnya.

Keuntungan secara langsung dapat diperoleh kedua negara, selain aspek religius, aspek ekonomi penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dapat diabaikan karena keduanya mampu memberikan margin keuntungan yang tinggi dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi sektor ini, yang akan membuka jalan bagi arus modal ke Mekah dan Madinah. Dan ini tidak hanya dalam urusan Haji dan Umrah saja, tapi juga untuk sektor UKM, sektor perhotelan yang bisa meraup dua pertiga sektor di seluruh pendapatan Arab Saudi, dan produk asli Indonesia yang dijual di pasar muslim di tanah suci juga memberi peluang bagi pengusaha Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan saudagar Arab.

Hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah hingga tahun 2019 untuk mewujudkan visi Arab 2030 dinilai berhasil, dikarenakan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menambah jumlah kuota Haji dan peningkatan kapasitas jemaah Umrah, dan peningkatan pelayanan untuk jemaah Indonesia, serta kebijakan dan inovasi lain yang telah dilakukan. Meski masih ada pelayanan yang mesti ditingkatkan guna memberi rasa aman dan nyaman dalam

beribadah bagi seluruh jemaah dari seluruh dunia. Peningkatan pelayanan dan kebijakan-kebijakan oleh Arab Saudi masih harus ditingkatkan lagi guna mencapai dan mewujudkan visi Arab Saudi di tahun 2030.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis ditujukan kepada peneliti-peneliti lain yang tertarik meneliti Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi. Ada beberapa hal yang penulis tidak bahas dalam kerja sama Haji dan Umrah ini yakni analisis target pemerintah Arab Saudi di tahun 2030 akan berhasil atau hanya sebuah cita cita kosong, dikarenakan masih banyak hal yang menurut penulis yang harus dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam mewujudkan cita cita kerajaan Arab Saudi di tahun 2030. Dalam tulisan ini penulis hanya membahas 1 batasan masalah saja dan membatasi periode hanya sampai tahun 2019. Namun peneliti-peneliti lain dapat lebih menggali tentang potensi sektor jasa Haji dan Umrah bagi peningkatan pendapatan ekonomi Arab Saudi selain dari sektor minyak bumi. Karena pendapatan ekonomi Arab Saudi dari sektor jasa Haji dan Umrah tergolong sangat besar, mengingat jumlah jemaah Haji dan Umrah yang sangat besar dari seluruh dunia.

Penulis juga berharap peneliti-peneliti lain juga bisa lebih meneliti dan memahami secara mendalam yang manakah yang lebih penting bagi Arab Saudi sektor minyak bumi atau sektor jasa Haji dan Umrah untuk mengetahui jumlah devisa negara, meski keduanya memang sangat penting bagi pendapatan negara Arab Saudi, karena keduanya memiliki sumbangan sangat besar bagi pendapatan ekonomi Arab Saudi. Penulis juga memberikan saran kepada peneliti lain untuk

lebih melihat secara mendetail perumusan-perumusan politik luar negeri dan misi yang dilakukan Arab Saudi kepada Indonesia dan negara-negara berpenduduk Islam lainnya dalam proses mewujudkan visi Arab Saudi di tahun 2030 dan manfaat dari kerja sama ini bagi kedua negara. Penulis juga berharap kepada peneliti-peneliti untuk lebih cermat mengamati apa saja yang dilakukan Arab Saudi dan Indonesia untuk mendukung visi Arab 2030 berhasil.

Semoga peneliti-peneliti lain tertarik untuk meneliti dan memahami hal-hal lain dalam kaitan hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi khususnya kerja sama penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Holsti, K. J. (1970). *National Role Conceptions In The Study Of Foreign Policy* (Volume 14, 13 ed).
- Jusuf, S. (1989). *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri Sebuah Analisis Teoritis Dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Sinar Harapan.
- Krisna, D. (1993). *Kamus Politik Internasional*. Jakarta, Indonesia : Grasindo.

### Referensi Internet

- [Arab Saudi mengelola Haji]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805111849-120-418421/mengintip-cara-pemerintah-arab-saudi-mengelola-haji>
- [Fast track jemaah Haji]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-4338960/saudi-kaji-usulan-ri-tentang-fast-track-jemaah-haji>
- [Haji dan peran pemerintah]. (n.d.). n/a. Diambil dari [www.dafalibrary.blogspot.com/2014/11/makalah-landasan-teori-haji-dan-peran.html](http://www.dafalibrary.blogspot.com/2014/11/makalah-landasan-teori-haji-dan-peran.html)
- [Haji dan Umrah sumber pendapatan Arab Saudi]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://kabar24.bisnis.com/read20160905/19/581267/arab-saudi-haji-dan-umroh-jadi-sumber-pendapatan-negara>
- [Haji dan Umrah]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.ekon.go.id/berita/print/pemerintah-terus-optimalkan.4627.html>
- [Hubungan internasional]. (n.d.). n/a. Diambil dari [www.setabasri01.blogspot.com/2009/02/hubungan-internasional.html](http://www.setabasri01.blogspot.com/2009/02/hubungan-internasional.html).
- [Hubungan luar negeri Indonesia]. (n.d.). n/a. Diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_luar\\_negeri\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_luar_negeri_Indonesia).
- [Inovasi penyelenggaraan haji]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/pjavrx384/ini-lima-inovasi-penyelenggaraan-haji-2019>

- [Inovasi penyelenggaraan haji]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://kemenag.go.id/berita/read/508597/menag-ungkap-8-inovasi-penyelenggaraan-haji-2019>
- [Inovasi penyelenggaraan haji]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.liputan6.com/haji/read/3997413/ini-12-inovasi-pada-penyelenggaraan-ibadah-haji-2019>
- [Kebijakan Arab Saudi]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/berikut-kebijakan-baru-arab-saudi-tentang-haji-dan-umrah/>
- [Kebijakan Arab Saudi]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/19/06/17/pt8enh458-kemenag-hormati-kebijakan-arab-saudi-terkait-visael-umrah>
- [Kemenag]. (n.d.). n/a. Diambil dari [https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=701:rasyidulbasrijuli&catid=41:top-headlines&Itemid=158](https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=701:rasyidulbasrijuli&catid=41:top-headlines&Itemid=158)
- [Kemenag]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1308.pdf>
- [Kolaborasi digital dua negara]. (n.d.) n/a. Diambil dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/19738/siaran-pers-no-126hmkominfo072019-tentang-tanda-tangani-nota-kesepahaman-indonesia-arab-saudi-perkuat-kolaborasi-digital-dua-negara/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19738/siaran-pers-no-126hmkominfo072019-tentang-tanda-tangani-nota-kesepahaman-indonesia-arab-saudi-perkuat-kolaborasi-digital-dua-negara/0/siaran_pers)
- [Konsep kebijakan luar negeri]. (n.d.). n/a. Diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\\_luar\\_negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri)
- [Konsep kebijakan luar negeri]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://iwansmile.wordpress.com/teori-kebijakan-luar-negeri/>
- [Konsep kebijakan luar negeri]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-luar-negeri-foreign-policy/5593/2>
- [Konsep kepentingan nasional]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://iwansmile.wordpress.com/konsep-kepentingan-nasional-national-interest/>
- [Pelayanan penyelenggaraan Haji]. (n.d.). n/a. Diambil dari [www.iphi.web.id/2015/11/28/profesionalitas-pelayanan-dalam-penyelenggaraan-haji/](http://www.iphi.web.id/2015/11/28/profesionalitas-pelayanan-dalam-penyelenggaraan-haji/)
- [Penyelenggaraan Umrah]. (n.d.). n/a. Diambil dari [manplawyers.co/2017/09/01/penyelenggaraan-umrah/](http://manplawyers.co/2017/09/01/penyelenggaraan-umrah/)

[Profil negara Arab Saudi]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-arab-saudi-saudi-arabia/>

[Profil negara Arab Saudi]. (n.d.). n/a. Diambil dari [www.mapnall.com/id/Peta-Arab-Saudi\\_34088.html](http://www.mapnall.com/id/Peta-Arab-Saudi_34088.html).

[Profil negara Indonesia]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia/>

[Profil negara Indonesia]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://portal-ilmu.com/negara-indonesia/>

[Profil negara Indonesia]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://tumoutounews.com/2018/12/31/profil-negara-indonesia-terbaru/>

[Transformasi pemerintah Arab Saudi]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1164186-visi-2030-jangan-takut-arab-saudi-akan-berubah-total>

[Umrah digital]. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d36ec222c862/pengembangan-penyelenggaraan-umrah-digital-bersifat-pilihan/>

[Visi Saudi 2030]. (n.d.). n/a. Diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Visi\\_Saudi\\_2030](https://id.wikipedia.org/wiki/Visi_Saudi_2030)

10 Negara dengan Jemaah Umrah Terbesar Menurut Kementerian Agama dan Umrah Arab Saudi 2016. (2017, Maret 03). n/a. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/berapa-jamaah-umrah-indonesia>

Adhitya, E. (2017, Maret 01). Jokowi Tegaskan RI Jadi Mitra Strategis Visi 2030 Arab Saudi. Diambil dari [www.suara.com](http://www.suara.com)

Akbar, R. J. (2019, April 25). 5 Fakta soal Jemaah Haji Indonesia yang Terbesar dan Terbaik di Dunia. Diambil dari <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/5-fakta-soal-jemaah-haji-indonesia-yang-terbesar-dan-terbaik-di-dunia/ar-BBWgzER>

Anggraeni, R. (29 Juni 2019). Indonesia – Rusia Perkuat Kerja Sama Bilateral Ekonomi. Diambil dari <https://ekbis.sindonews.com/read/1415968/33/indonesia-rusia-perkuat-kerjasama-bilateral-ekonomi-1561809176>

Ariesta, M. (2018, Februari 26). Arab Saudi dan Keterikatan dengan Indonesia. Diambil dari [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com).

- Ariesta, M. (2019, Juli 15). Jemaah Haji Indonesia Disambut Pangeran Arab Saudi. Diambil dari <https://www.medcom.id/haji/news-haji/ybD0OXAb-jemaah-haji-indonesia-disambut-pangeran-arab-saudi>
- Ariesta, M. (n.d.). Untuk Kali Pertama, Pangeran Arab Saudi Sambut Jemaah Indonesia. Diambil dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/247046-untuk-kali-pertama-pangeran-arab-saudi-sambut-jemaah-indonesia>
- Aziz, N. (2017, Februari 28). Mengharap keuntungan hubungan ekonomi Saudi-Indonesia. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39104120>
- Azra, A. (2015, September 29). Haji dan Politik, Indonesia dan Arab Saudi. Diambil dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Biaya Ibadah Haji Tahun 2019 Capai Rp72 Juta!. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/marisa-safitri-2/bukan-rp35-juta-ini-jumlah-biaya-ibadah-haji-sebenarnya-regional-sulsel/full>
- Cadangan Minyak Arab Capai 268,5 Miliar Barel, 84 Kali RI. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190110125740-17-50005/cadangan-minyak-arab-capai-2685-miliar-barel-84-kali-ri>
- Christianto. (2019, Juli 10). 11 JCH Embarkasi Makassar Tertunda Keberangkatan Menuju Tanah Suci. Diambil dari [http://rri.co.id/post/berita/691855/info\\_haji\\_2019/11\\_jch\\_embarkasi\\_makassar\\_tertunda\\_keberangkatan\\_menuju\\_tanah\\_suci.html](http://rri.co.id/post/berita/691855/info_haji_2019/11_jch_embarkasi_makassar_tertunda_keberangkatan_menuju_tanah_suci.html)
- Daftar 10 Negara Islam Paling Makmur di Dunia. (2019, Mei 11). n/a. Diambil dari [www.koran.sindo.com](http://www.koran.sindo.com)
- Dampak Positif dan Manfaat Teknologi untuk Kegiatan Ibadah Haji. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://kumparan.com/@kumparantech/dampak-positif-dan-manfaat-teknologi-untuk-kegiatan-ibadah-haji-1534842150868053759>
- Denny. (2016, Agustus 18). Visi 2030 Saudi, Per Tahun Terima 30 Juta Jemaah Haji-Umroh. Diambil dari [www.CNNIndonesia.com](http://www.CNNIndonesia.com)
- Devisa Haji Tahun 2022 Saudi Mencapai 220 Miliar Dolar AS. (n.d.). n/a. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/06/23/pas1g1385-devisa-haji-tahun-2022-saudi-mencapai-220-miliar-dolar-as>
- Dialog 2+2 Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Australia keempat (27 Oktober 2016). n/a. Diambil dari [https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16\\_071.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_071.html)

- Hafiyyan. (2019, Mei 07). BPKH: Tambah Kuota 10.000 Jemaah, Dana Haji Aman. Diambil dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190507/12/919344/bpkh-tambah-kuota-10.000-jemaah-dana-haji-aman>
- Hasan, A. M. (2016, September 14). Usaha Arab Saudi Menyedot Riyal dari Umrah dan Haji. Diambil dari <https://tirto.id/usaha-arab-saudi-menyedot-riyal-dari-umrah-dan-haji-bKL8>
- Hidayat, R. (2019, Januari 21). Kebijakan Biometrik, Keamanan Data Pribadi Jamaah Haji-Umrah Dipertanyakan. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c459bd1c858f/kebijakan-biometrik--keamanan-data-pribadi-jamaah-haji-umrah-dipertanyakan/>
- Idrus, P. G. (2018, Desember 11). Kuota Haji Indonesia pada 2019 Sebanyak 221 ribu. Diambil dari <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/kuota-haji-indonesia-pada-2019-sebanyak-221-ribu/1335038>
- Indriaswari, R. (2019, Juli 15). Pertama dalam Sejarah, Pangeran Arab Saudi Sambut Jamaah Haji Indonesia. Diambil dari <https://netz.id/news/2019/07/15/00516/1011150719/pertama-dalam-sejarah-pangeran-arab-saudi-sambut-jamaah-haji-indonesia>
- Investasi Arab Saudi ke Indonesia Masih Minim (*n.d.*) *n/a.* Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/06/investasi-arab-saudi-ke-indonesia-masih-minim>
- Januarius, F. S. (2018, Oktober 22). Ini Arahan Jokowi Bagi Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi. Diambil dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Julio, E. (2016, Desember 03). Arab Saudi Pastikan Visa Haji dan Umrah Gratis. Diambil dari <https://news.okezone.com/read/2016/12/03/18/1558201/arab-saudi-pastikan-visa-haji-dan-umrah-gratis>
- Kerja sama dapat diadakan dalam rangka peningkatan hubungan bilateral. (*n.d.*) *n/a.* Diambil dari <https://www.coursehero.com/file/p233t96/kerjasama-dapat-diadakan-dalam-rangka-peningkatan-hubungan-bilateral-maupun-17/>
- Kerjasama Bilateral: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. (*n.d.*) *n/a.* Diambil dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-internasional>
- Kuota Ditetapkan 221.000, Calon Jemaah Haji 2019 Wajib Rekam Biometrik di Tanah Air. (2019, Januari 22). *n/a.* Diambil dari [www.sekretariatkabinetrepublikindonesia.id](http://www.sekretariatkabinetrepublikindonesia.id)

- Kuota Haji Indonesia Bertambah, Apa yang Perlu Dipersiapkan?. (2019, April 15). *n/a*. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/edysupriatna/5cb4307895760e410c7e2212/kuota-haji-indonesia-bertambah-apa-yang-perlu-dipersiapkan?page=4>
- Kurniawati, E. (2019, April 15). Jokowi Umrah, Kerajaan Arab Saudi Tambah 10 ribu Kuota Haji. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1195814/jokowi-umrah-kerajaan-arab-saudi-tambah-10-ribu-kuota-haji/full&view=ok>
- Kusumawardhani, A. (2018, Februari 18). Inilah Standar Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. Diambil dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20180218/79/739854/inilah-standar-akomodasi-jemaah-haji-indonesia-di-arab-saudi>
- Mengintip Cara Pemerintah Arab Saudi Mengelola Haji. (2019, Agustus 11). *n/a*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805111849-120-418421/mengintip-cara-pemerintah-arab-saudi-mengelola-haji>
- Mengintip Cara Pemerintah Arab Saudi Mengelola Haji. (2019, Agustus 11). *n/a*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805111849-120-418421/mengintip-cara-pemerintah-arab-saudi-mengelola-haji>
- Mengintip Cara Pemerintah Arab Saudi Mengelola Haji. (2019, Agustus 11). *n/a*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805111849-120-418421/mengintip-cara-pemerintah-arab-saudi-mengelola-haji>
- Michaella, S. (2018, Februari 26). TKI, Kuota Haji dan Bali Warnai Hubungan Indonesia-Arab Saudi. Diambil dari [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com)
- Noviyanti, D. (2018, Februari 13). Targetkan 30 Juta Jamaah Di 2030, Saudi Perluas Masjidil Haram. Diambil dari [www.suara.com](http://www.suara.com)
- Nugraha, F. (2018, April 24). Visi 2030 dan Keterbukaan Arab Saudi. Diambil dari [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)
- Nunuhitu, E. (2017, Maret 14). Kunjungan Raja Salman Merupakan Realisasi Strategi Ekonomi yang Menguntungkan Arab Saudi. Diambil dari <https://www.kompasiana.com/evertnunuhitu/58c6d281ae7e618e7294c328/kunjungan-raja-salman-merupakan-realisisi-strategi-ekonomi-yang-menguntungkan-arab-saudi>
- Nurmayanti. (2019, April 24). Skema Pembagian Tambahan Kuota Haji 10 Ribu Diumumkan Pekan Ini. Diambil dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

- Nurmayanti. (2019, April 25). Kuota Haji Bertambah 10 Ribu, Kemenag Siapkan 125 Petugas. Diambil dari <https://www.liputan6.com/haji/read/3949872/kuota-haji-bertambah-10-ribu-kemenag-siapkan-125-petugas>
- Om. (n/d). Hubungan Bilateral Dalam Hubungan Internasional, [Blog.spot.com]. Diambil dari [pengertianmenurutahli.blogspot.com/2013/06/hubungan-bilateral-dalam-hubungan-internasional.html](http://pengertianmenurutahli.blogspot.com/2013/06/hubungan-bilateral-dalam-hubungan-internasional.html)
- Pangeran Saudi Tampak Tak Sabar Ingin Reformasi Kerajaan. (2016, Juli 12). n/a. Diambil dari <https://www.voaindonesia.com/a/pangeran-saudi-tampak-tak-sabar-ingin-rombak-kerajaan/3414660.html>
- Paramita, R. P. (2016, September 12). 30 Tahun mengantre menuju Tanah Suci. Diambil dari [www.beritaagar.id](http://www.beritaagar.id)
- Pengusaha Indonesia-Saudi tanda tangani empat MoU kerjasama. (2017, Maret 03). n/a. Diambil dari [www.rappler.com](http://www.rappler.com)
- Pitakasari, A. R. (2011, Juli 11). Menag Optimistis Indonesia Peroleh Tambahan Kuota Haji. Diambil dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/11/07/11/lo5uh0-menag-optimistis-indonesia-peroleh-tambahan-kuota-haji>
- Purwo, E. (2017, Maret 03). Janji Investasi Arab Saudi. Diambil dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Ramadhani, Z. A. (2018, Juli 27). Haji Dan Umroh: Penghasilan Abadi Arab Saudi. Diambil dari <https://geotimes.co.id/opini/haji-dan-umroh-penghasilan-abadi-arab-saudi/>
- Romadoni, A. (2017, Februari 26). Indonesia Teken 11 Kerja Sama dengan Arab Saudi, Apa Saja ?. Diambil dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)
- Romadoni, A. (2017, Januari 11). Jokowi: Kuota Haji Indonesia untuk 2017 Naik Jadi 221.000. Diambil dari [https://www.liputan6.com/haji/read/2824351/jokowi-kuota-haji-indonesia-untuk-2017-naik-jadi-221000?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/haji/read/2824351/jokowi-kuota-haji-indonesia-untuk-2017-naik-jadi-221000?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)
- Rosyadi, T. Y. (n/d). Konsep Hubungan Bilateral, [Theappledore.wordpress.com]. Diambil dari <https://theappledore.wordpress.com/konsep-hubungan-bilateral/>
- Sakinah, R. (2017, Februari 28). Kunjungan Raja Salman, 11 Nota Kesepahaman Indonesia-Arab Saudi. Diambil dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Sakinah. (2017, Maret 07). Kunjungan Raja dan Prospek Ekonomi Haji. Diambil dari [www.koransindo.com](http://www.koransindo.com)

Saudi dan Swasta Satukan Visi Sambut 30 Juta Jamaah 2030. (*n.d.*). *n/a*. Diambil dari <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/12/26/pkc880320-saudi-dan-swasta-satukan-visi-sambut-30-juta-jamaah-2030>

Setiawan, S. R. D. (2016, Oktober 17). Atasi Defisit Anggaran, Arab Saudi Terbitkan Obligasi 15 Miliar Dollar AS. Diambil dari <https://money.kompas.com/read/2016/10/17/110000426/atasi.defisit.anggaran.arab.saudi.terbitkan.obligasi.15.miliar.dollar.as>

Sihombing, M. (2016, September 05). ARAB SAUDI: Haji dan Umroh Jadi Sumber Pendapatan Negara. Diambil dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20160905/19/581267/arab-saudi-haji-dan-umroh-jadi-sumber-pendapatan-negara>

Suadi. (2017, Maret 04). Memanfaatkan Investasi Petrodolar Raja Arab. Diambil dari <http://harian.analisadaily.com/opini/news/memanfaatkan-investasi-petrodolar-raja-arab/331215/2017/03/04>

Sukandar, C. A. (*n.d.*). 10 Negara Muslim Paling Kaya di Dunia, Arab Bukan Posisi Pertama!. Diambil dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read227931/10-negara-muslim-paling-kaya-di-dunia-arab-bukan-posisi-pertama.html>

Suryowati, E. (2017, Maret 03). 11 MoU RI-Arab Saudi Sudah Diteken, Lantas Apa Dampaknya ?. Diambil dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

Wirawan, J. (2017, Januari 12). Tanpa pengawasan, penambahan sejuta kuota haji Indonesia 'tidak cukup'. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38588686>

Yulianingsih, T. (2017, Februari 27). Ini Sumber Kekayaan Melimpah Raja Arab Saudi ?. Diambil dari <https://www.liputan6.com/global/read/2869854/ini-sumber-kekayaan-melimpah-raja-arab-saudi>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Nama Orang Tua:**

Andi Muhammad Kasim Syamsu. Lahir di Polewali, 07 November 1960.

Rasni Yosdaenir. Lahir di Enrekang, 08 November 1960.

### **Saudara Kandung:**

Ahmad Faisal Kasim. Lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1992.

Siti Namirah Kasim. Lahir di Ujung Pandang, 16 Oktober 1999.

### **Riwayat Pendidikan:**

1998-1999 : TAMAN KANAK KANAK ANGKASA PURA I WIRABUANA,  
UJUNG PANDANG.

1999-2000 : SEKOLAH DASAR NEGERI SUDIRMAN II, UJUNG  
PANDANG.

2000-2004 : SEKOLAH DASAR NEGERI 76 MALIMONGAN, PALOPO.

2004-2005 : SEKOLAH DASAR NEGERI LARIANG BANGI II,  
MAKASSAR.

2005-2008 : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KARTIKA WIRABUANA  
I, MAKASSAR.

2008-2011 : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16, MAKASSAR.